



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

“SIMAK KUNKER”

SISTEM Matriks

HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

Disusun Oleh:

Nama : Kunarto, S.Sos
NIP : 197310161994031002
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018



LEMBAR PENGESAHAN PROYEK PERUBAHAN

SIMAK KUNKER “Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI”

Disusun Oleh:

Nama : Kunarto, S.Sos
NIP : 197310161994031002
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Peserta Diklat,


(Kunarto, S.Sos)

Menyetujui
Mentor,


(Dra. Prima, MB. Nuwa, MSi)

Menyetujui
Coach,


(Dr. Ir. Suharyoto, MS)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan dengan Judul "SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI". Laporan Pelaksanaan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan proyek perubahan yang sudah direncanakan dalam Rencana Proyek Perubahan pada unit kerja kami yang mana tidak terlepas dari TUSI unit kerja sebagai Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi V DPR RI. Dalam penyusunan laporan proyek perubahan ini, penulis mendapat banyak saran dan masukan dari Mentor, Coach (Pembimbing), Tim Efektif, dan Stakeholders terkait, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Prima M.B, Nuwa, MSi, - Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI dan Ibu Suprihartini, SIP, MSi sebagai Mentor yang telah memberikan dukungan, saran, dan persetujuan terhadap proyek perubahan ini.
2. Bapak Dr. Ir. Suharyoto, M.S, sebagai Coach yang telah memberikan bimbingan, saran, perbaikan dan pengarahan terhadap aspek substansi pada setiap tahapan perkembangan proyek perubahan ini serta memberikan motivasi dalam keberhasilan tahapan pelaksanaan.
3. Ibu Dr. Rahayu Setiawardhani, MSI, sebagai Penguji yang memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun sehingga laporan ini menjadi lebih sempurna.
4. Tim Efektif yang telah mendukung setiap tahap proyek perubahan ini sehingga penyelesaian setiap tahapan kegiatan dapat sesuai waktu
5. Para stakeholders yang telah terlibat dan mendukung proyek perubahan ini
6. Rekan-rekan seangkatan Diklat PIM IV angkatan I yang selalu saling mendukung, menjalin komunikasi dan kerjasama selama pelaksanaan Diklat PIM IV.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Laporan Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu mohon saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Proyek Perubahan ini.

Jakarta, Desember 2018

Penulis,

Kunarto, S.Sos

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN	5
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN	5
D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	6
 BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	 7
A. DESKRIPSI	7
B. PENTAHAPAN (MILESTONES) PROYEK PERUBAHAN	7
C. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN	10
D. TIM EFEKTIF	14
E. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN	15
 BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	 18
A. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN	18
B. TARGET CAPAIAN JANGKA PENDEK	31
C. PERUBAHAN PETA STAKEHOLDERS	34
D. KENDALA/MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA	34
E. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	35
F. LEADERSHIP LESSONS LEARNED	36
 BAB IV PENUTUP	 38
A. KESIMPULAN	38
B. SARAN/REKOMENDASI	39
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG/BURNING PLATFORM

Pasal 20A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi-fungsi ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) Pasal 69 yang menyatakan bahwa ketiga fungsi DPR ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Pelaksanakan tiga fungsi tersebut, tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya sistem pendukung (*supporting system*), khususnya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan aparatur negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan dukungan, teknis dan administratif serta dukungan keahlian kepada DPR RI.

Berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 telah dibentuk sebanyak 11 (sebelas) Komisi, diantaranya adalah Komisi V DPR RI yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bermitra kerja dengan beberapa kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Sebagai wujud pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi, melihat secara langsung kegiatan pembangunan, melalui Kunjungan Kerja Komisi pada Masa Reses dan

Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu di dalam Masa Sidang. Dalam setiap pelaksanaan kunjungan kerja, baik itu kunjungan kerja pada Masa Reses maupun kunjungan kerja spesifik selalu didampingi oleh unsur pejabat dan staf Bagian Sekretariat Komisi V yang memberikan dukungan teknis dan administratif agar pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud dapat berjalan dengan optimal.

Sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

Visi: "Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI"

Misi:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;
2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Karena kedudukannya yang strategis dalam pemberian dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian, maka Setjen dan Badan Keahlian DPR RI harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Bila dikaitkan dengan visi dan misi di atas, maka Sekretariat Komisi V dalam pemberian dukungan kepada Dewan dituntut harus **profesional**, yaitu mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Sejalan dengan hal itu, Peraturan Sekretaris Jenderal Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 7 Tahun 2018, disebutkan bahwa tugas Bagian Sekretariat Komisi V adalah melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi

- V, dan untuk melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi IV;
 - b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Komisi V;**
 - e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi V;
 - f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan I; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.

Dalam rangka pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Komisi V, setiap selesai pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi, maka Sekretariat Komisi V DPR RI akan menyusun dan membuat Laporan Kunjungan Kerja berdasarkan bahan/data yang diperoleh dari Kunjungan Kerja baik tertulis, rekaman, catatan-catatan pada saat rapat atau peninjauan lapangan, maupun masukan dari anggota Tim Kunjungan Kerja sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan tersebut antara lain memuat mengenai hasil temuan dan permasalahan serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Laporan hasil kunjungan kerja dimaksud dikoreksi dan diberikan masukan oleh Anggota yang mengikuti kunjungan kerja dan ditandatangani oleh Pimpinan Komisi V DPR RI yang menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja, yang selanjutnya disampaikan secara resmi dalam suatu forum Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V.

Disatu sisi, laporan tersebut semestinya ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya kementerian/lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI, dan disisi yang lain, Komisi V juga perlu melakukan pemantauan apakah temuan, permasalahan serta rekomendasi yang ada di dalam Laporan Kunjungan Kerja telah ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pemerintah. Selama ini proses dan mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap hasil-hasil kunjungan kerja dimaksud masih belum efektif dilaksanakan. Komisi V DPR RI masih menghadapi

kesulitan untuk mengidentifikasi apakah temuan dan permasalahan yang ditemukan selama kunjungan kerja sudah dapat ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh Pemerintah.

Sesuai data dari Laporan Kinerja Komisi V, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2018, Komisi V DPR RI telah melakukan kegiatan Kunjungan Kerja pada Masa Reses sebanyak **3 (tiga) kegiatan**, dan Kunjungan Kerja Spesifik sebanyak **16 (enam belas) kegiatan**. Dengan begitu banyaknya kegiatan kunjungan kerja tersebut, maka anggota Dewan akan semakin kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi V mengenai tindak lanjut hasil kunjungan kerja hanya bersifat parsial dan dilakukan pada saat Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat yang berbarengan dengan materi acara lainnya, sehingga pembahasannya kurang fokus. Selain itu, sampai saat ini belum adanya suatu format/matriks yang berisikan data dan informasi mengenai temuan, permasalahan dan rekomendasi hasil-hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang tersusun secara komprehensif yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi V.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut pada proyek perubahan ini diputuskan untuk melakukan solusi inovatif yaitu membuat Sistem Matriks hasil temuan, permasalahan, dan rekomendasi Kunjungan Kerja yang telah dilakukan oleh Komisi V DPR RI yang disusun dan dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi V. Hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota Komisi V DPR RI melakukan pemantauan dan mengidentifikasi terhadap temuan, permasalahan dan rekomendasi selama Kunjungan Kerja yang sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V. Proyek Perubahan yang akan dilakukan oleh reformer berjudul **“SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI”**

B. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Lokus proyek perubahan ini adalah di sub bagian rapat sekretariat Komisi V DPR RI, dengan fokus kegiatan yang terkait dengan penatalaksanaan dalam penyediaan dan penyampaian data dan informasi yang akurat kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V serta stakeholders melalui pembuatan sistem matriks hasil Kunker, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Tahapan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan proyek perubahan sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Efektif;
2. Terwujudnya persepsi yang sama terhadap Proyek Perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khususnya di Bagian Sekretariat Komisi V;
3. Terlaksananya Kegiatan Klasifikasi dan menginput data dan informasi;
4. Tersusunnya Pedoman Teknis penyampaian Matriks Hasil Kunjungan Kerja;
5. Terlaksananya Sosialisasi dan Penyampaian Matriks kepada Mitra Kerja Komisi V dan stakeholders;
6. Terlaksananya Penyampaian Data/informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V untuk monitoring dan evaluasi.

C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

a. Tujuan Jangka Pendek:

Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah **"Tersusunnya Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi V."**

b. Tujuan Jangka Menengah:

Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan ini adalah **"Terlaksananya sosialisasi dan implementasi Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya."**

c. **Tujuan Jangka Panjang:**

Tujuan jangka panjang dari proyek perubahan ini adalah “**Terlaksananya pemantauan dan evaluasi temuan hasil Kunjungan Kerja secara optimal dan berkelanjutan.**”

D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Dengan dilaksanakannya proyek perubahan ini maka manfaat yang diperoleh sebagai berikut

1) Organisasi dan Anggota Komisi V:

- meningkatkan kinerja Bagian Sekretariat Komisi V dalam pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V
- memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai temuan, permasalahan, dan rekomendasi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

2) Stake Holders:

- memperoleh data dan informasi yang akurat sehingga lebih mudah dalam memetakan hasil temuan dan permasalahan yang diprioritaskan untuk segera diselesaikan.

3) Peserta:

- lebih mudah memperoleh data dan informasi sehingga dapat menginformasikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V.
- sebagai wujud pertanggungjawaban dalam menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, dalam hal ini untuk memantau sejauhmana Kementerian/Lembaga Mitra kerja Komisi V sudah menindaklajuti dan menyelesaikan permasalahan atau rekomendasi Kunjungan Kerja yang sudah dilakukan oleh Komisi V, yang selama ini masih sulit untuk diidentifikasi, maka perlu di buat suatu Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V yang disusun dan dikelompokan sesuai mitra kerja Komisi V.

Matriks tersebut berisikan data dan informasi antara lain mengenai tanggal pelaksanaan Kunjungan Kerja, objek atau lokasi yang dikunjungi, Ketua dan Anggota Tim, Rekomendasi/permasalahan yang ditemukan, serta target penyelesaian oleh Pemerintah/Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V.

Selanjutnya Matriks Hasil Kunjungan Kerja tersebut, akan disampaikan kepada semua mitra kerja Komisi V DPR RI untuk memperoleh jawaban atau tanggapan terhadap permasalahan yang ditemui saat kunjungan kerja. Matriks yang telah mendapat tanggapan dari mitra kerja akan dikaji dan dianalisa kembali dan hasilnya akan disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI sebagai bahan dan data untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

B. PENTAHAPAN (MILESTONES) PROYEK PERUBAHAN

Sesuai dengan tahapan-tahapan (milestones) yang telah direncanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan "SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI", maka proyek perubahan ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

Adapun pentahapan dan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

No.	Milestone	Kegiatan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
1.	<u>Jangka Pendek :</u> a. Terbentuknya Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Internal Tim Melakukan Koordinasi dan membangun komitmen Pembuatan Surat Tugas Pembagian tugas Tim Melaporkan kegiatan ke mentor 	Project Leader	Minggu I Okt '18	Surat Tugas Tim
	b. Terwujudnya persamaan persepsi dan tersusunnya Rencana Kerja Tim	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsolidasi Tim Rapat Tim untuk menentukan sasaran dan capaian kerja Melaporkan kegiatan ke mentor 	Project Leader	Minggu II Okt '18	Pernyataan dukungan
	c. Terlaksananya Kegiatan Klasifikasi data dan informasi dalam Sistem Matriks Hasil Kunker	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi data Laporan Kunker. Melakukan analisa dan identifikasi data dan informasi pengelompokan data/ informasi sesuai mitra kerja Komisi V Melakukan input data dalam Matriks 	Tenaga Ahli Dan staf Sub Bag Rapat	Minggu III Okt '18 s.d Minggu I Nov '18	Dokumen Dokumentasi
	d. Tersusunnya Pedoman Teknis penyusunan Matriks Hasil Kunker	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Konsep panduan teknis kegiatan Mengkomunikasikan kegiatan ke penghubung mitra kerja Melakukan pengelolaan dan penataan dokumen 	Tenaga Ahli Dan staf Sub Bag Rapat	Minggu II Nov '18	Dokumen pedoman teknis

No.	Milestone	Kegiatan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
	e. Terlaksananya Sosialisasi dan Penyampaian Matriks Hasil Kunker ke Mitra Kerja Komisi V	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan ke penghubung mitra kerja Melakukan uji coba/pilot project Melakukan konfirmasi ke Mitra Kerja 	Kasubag TU	Minggu II dan III Nov '18	Jumlah stakeholders yang tersosialisasi
	f. Tersedianya laporan dan rencana tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa dan mengidentifikasi data yang sudah valid Melakukan input data/ informasi Menyusun laporan implementasi Membuat surat pernyataan komitmen keberlangsungan Proyek Perubahan 	Project Leader	Minggu IV Nov '18	Dokumen
	g. Pembuatan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi data, informasi, dan dokumentasi Penulisan laporan Mentoring dan couching 	Project Leader	Minggu IV Nov '18	Laporan
2.	<u>Jangka menengah</u>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi data dan checklist data Menyampaikan ke Pimpinan dan Anggota Komisi Penggunaan data dan informasi untuk melakukan pengawasan 	Project Leader	Minggu III Desember '18 s.d Minggu II Februari '19	Laporan dokumen

No.	Milestone	Kegiatan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
	b. Tersedianya Klasifikasi data dan informasi dalam Sistem Matriks Hasil Kunker secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa dan mengidentifikasi data/ informasi Melakukan pengkinian data dan informasi Melakukan Bimtek untuk pegawai 	Project Leader	Minggu Februari '19 sd Minggu II Maret '19	Laporan dokumen
	c. Terlaksananya penyempurnaan dan penyebarluasan informasi kepada stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upload data dan informasi di website Menginformasikan dan sosialisasi kepada stakeholders 	Project Leader	Minggu Maret sd Minggu IV Maret '19	Laporan dokumen
3.	<u>Jangka Panjang</u> Evaluasi dan Monitoring secara optimal dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Mengagendakan rapat untuk evaluasi hasil kunjungan kerja secara berkelanjutan Melakukan pengkinian data dan informasi secara berkala Membuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi 	Project Leader	Minggu I Mei '19 sd Minggu IV Mei '20	Laporan dokumen

C. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan setiap stakeholders pada proyek perubahan ini dapat dikelompokan pada diagram kelompok stakeholders sebagai berikut:

No	Stakeholder	Kepentingan	Tingkat Kepentingan (T/R)	Sikap Dukungan (+), (-), (+/-)	Peran yang diharapkan	Dampak terhadap Upaya/Posisi Stakeholder (P, L, D, A)	Strategi Komunikasi
Internal							
1	Kepala Biro Persidangan I	Memperoleh data dan informasi, mudah mengambil kebijakan	Tinggi	+	Menyampaikan dan menginformasikan data ke Pimpinan	Promotors	Manage closely (konsultasi intensif dan diskusi)
2	Kepala Bagian Setkom V	Memudahkan dalam penyampaian infomasi	Tinggi	+	Membantu mengkomunikasikan PP kepada Pimp. dan Anggota Komisi V dan Mitra Kerja	Promotors	Manage closely (konsultasi intensif dan diskusi)
3	Kasubag Tata Usaha	Memudahkan Menyampaikan Informasi ke Stake holders	Tinggi	+	Membantu menganalisa dan menyusun data	Promotors	Manage closely (konsultasi intensif dan diskusi)
4	Tenaga Ahli Komisi	Memperoleh Data dan Informasi	Rendah	+/-	Membantu menyiapkan bahan dan data	Defenders	Keep informed (sosialisasi, diskusi, dan konsultasi intensif)
5	Staf Sekretariat Komisi V	Memudahkan pelaksanaan pekerjaan	Rendah	+/-	Membantu dan menyusun dan menginput bahan/ data	Defenders	Keep informed (sosialisasi, diskusi, dan konsultasi intensif)
Eksternal							
1	Pimpinan dan Anggota Komisi V	Optimalisasi Pelaksanaan tugas dan fungsi	Tinggi	+	Menyampaikan dan menginformasikan ke Mitra Kerja	Latens	Keep Satisfied (Infomatif, persuasif, dan komunikasi intensif)
2	Penghubung Mitra Kerja Komisi V	Mudah memetakan temuan kunker	Rendah	-	Menyampaikan dan menginformasikan ke Pimpinan Instansinya	Apathetics	Minimal Effort (Persuasif)
3.	Tenaga Ahli Anggota	Memperoleh Data dan Informasi	Rendah	-	Menyampaikan informasi ke Anggotanya	Apathetics	Minimal Effort (Persuasif)

No	Stakeholder	Kepentingan	Tingkat Kepentingan (T/R)	Sikap Dukungan (+), (-), (+/-)	Peran yang diharapkan	Dampak terhadap Upaya/Posisi Stakeholder (P, L, D, A)	Strategi Komunikasi
4.	Penghubung Perwakilan Daerah	Memperoleh Data dan Informasi	Rendah	-	Menyampaikan hasil tindaklanjut ke Pimpinannya	Apathetics	Minimal Effort (Persuasif)

Selanjutnya, dilakukan pemetaan pengaruh dan interest yang dituangkan ke dalam suatu diagram kuadran sebagai berikut:

Window Stakeholders
(Kuadran Pengaruh dan Dukungan Stakeholders)



Kuadran 1 / Promotors

Adalah kelompok *stakeholders* yang pengaruhnya besar dan kepentingannya terhadap proyek perubahan juga tinggi. Kelompok ini merupakan *key player* dalam menjalankan perubahan yang akan dilakukan

Strategi yang dilakukan:

1. Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan dan bermanfaat serta selalu mendengarkan dengan baik saran dan pendapatnya.
2. Hal hal yang dikomunikasikan antara lain dengan menyampaikan maksud, tujuan, manfaat dan output yang dihasilkan serta *impact* dari proyek perubahan
3. Menyampaikan dukungan dukungan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan proyek perubahan.

Kuadran 2 /Latents

Adalah kelompok *stakeholders* yang pengaruhnya besar namun kepentingannya terhadap proyek perubahan rendah. Kelompok ini umumnya pejabat yang berpengaruh terhadap jalannya proyek perubahan.

Strategi yang dilakukan:

1. Orang-orang ini harus dibuat tetap senang. Mereka dengan kekuatan yang besar tapi ketertarikan sedikit harus tetap merasa puas. Ingat bahwa tingkat ketertarikan dapat berubah dengan cepat saat stakeholder tidak merasa puas
2. Memperlakukan mereka dengan baik, tetapi tidak perlu terlalu berlebihan sehingga mereka akan menjadi bosan dengan kita

Kuadran 3 / Defenders

Adalah kelompok *stakeholders* yang memiliki pengaruh kecil tetapi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan.

Strategi yang dilakukan;

1. Komunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan proyek perubahan ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa kita mampu untuk mengemban amanah.
2. Menjaga semangat, motivasi dan memberikan apresiasi dan mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar proyek dapat terlaksanakan
3. Pertahankan agar orang-orang yang masuk golongan ini tetap selalu mendapatkan informasi dan usahakan berbicara dengan mereka untuk memastikan bahwa tidak ada masalah besar yang timbul.

Kuadran 4 / Apathetics

Adalah kelompok stakeholders yang pengaruhnya kecil dan kepentingannya juga kecil terhadap proyek perubahan. Potensi resistensinya rendah karena mereka tidak terlibat langsung terhadap proyek perubahan.

Strategi yang dilakukan;

1. Memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dari kegiatan proyek perubahan ini.
2. Monitor terus stakeholders ini, tetapi jangan sampai membuat mereka bosan dengan komunikasi yang berlebihan

D. TIM EFEKTIF

Untuk mencapai tujuan proyek perubahan, diperlukan pembentukan Tim Efektif dengan mempertimbangkan tingkat pengaruh, sikap dukungan, keahlian, dan kontribusi yang dapat diberikan oleh masing-masing anggota Tim. Berdasarkan tujuan proyek perubahan dan hasil identifikasi serta analisa stakeholders, maka tim efektif yang akan dibentuk proyek perubahan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Sekretariat Komisi V;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Staf sub bagian tata usaha Sekretariat Komisi V;
4. Staf sub bagian rapat Sekretariat Komisi V;
5. Tenaga Ahli Komisi.

E. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

STRUKTUR	DESKRIPSI
<p>Struktur tim/orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek perubahan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mentor : Kepala Bagian Sekretariat Komisi V • Project Leader : Kasubbag Rapat (Reformer) • Tim Kerja Teknis : - Staf Subbag Rapat - Tenaga Ahli • Tim Kerja Administratif : - Kasubbag TU - Staf Subbag Tata Usaha • Coach : Widyaiswara

DESKRIPSI

Keanggotaan Tim mempunyai peran dan tugas masing-masing, yaitu :

1. Mentor/Atasan Langsung

Kepala Bagian Sekretariat Komisi V, Ibu Dra. Prima MB, Nuwa, MSi selaku Mentor memberikan persetujuan, dukungan, bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan setiap tahapan perkembangan proyek perubahan ini serta mendampingi dalam tahapan pelaksanaan jangka pendek proyek perubahan agar tepat waktu.

2. Coach

Widyaiswara LAN, Bapak Dr. Ir. Suharyoto, MS., selaku Coach memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap aspek substansi pada setiap tahapan perkembangan proyek perubahan ini serta memberikan motivasi dalam keberhasilan tahapan pelaksanaan jangka pendek proyek perubahan.

3. Project Leader

Kepala Subbag Rapat, bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek perubahan ini dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders serta melakukan eksekusi terhadap keseluruhan tahapan (milestone) yang telah dirancang dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada.

4. Tim Kerja Administratif

Tim ini bertanggung jawab atas kegiatan administrasi pada setiap tahapan proyek perubahan, antara terkait pembuatan surat undangan, membuat surat tugas, membuat daftar hadir, dan jamuan rapat. Tim ini terdiri dari Kasubag Tata Usaha dan staf sub bagian tata usaha, dengan keanggotaan Tim Kerja Administratif sebagai berikut:

1.	Nunik Prihatin B. Astuti, SH	Koordinator	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Nina Herlina, SH	Anggota	Analis Tata usaha
3.	Ria Damayanti	Anggota	Pengolah Data
4.	Muhamad Sodik, SE	Anggota	Pengadministrasi Umum
5.	Misna Parman	Anggota	Pengadministrasi Umum

5. Tim Kerja Teknis

Tim ini bertanggung jawab membuat konsep Sistem Matriks, melakukan analisa, pengklasifikasian, dan melakukan input data serta melakukan monitoring dan evaluasi. Tim ini terdiri dari staf sub bagian rapat dan staf ahli Komisi V DPR RI dengan keanggotaan Tim Kerja Teknis sebagai berikut:

1.	Dyah Renowati, S.Sos	Koordinator	Analis Data & Informasi
2.	Aris Munandar	Anggota	Pengadministrasi Rapat
3.	Muhamad Subqi	Anggota	Pengelola Persidangan
4.	M. Hasbi Azis	Anggota	Tenaga Ahli Komisi
5.	Hendro Wibowo	Anggota	Tenaga Ahli Komisi
6.	Dimas Dipoyono	Anggota	Tenaga Ahli Komisi
7.	Adi Setiawan	Anggota	Tenaga Ahli Komisi
8.	Salihudin	Anggota	Tenaga Ahli Komisi

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan "SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Pelaksanaan kegiatan pada tiap tahapan untuk proyek perubahan ini dapat kami uraikan secara garis besar sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan Jangka Pendek:

NO	MILESTONE (TAHAPAN CAPAIAN DAN KEGIATAN)	OUTPUT	WAKTU/MINGGU	
			RENCANA	REALISASI
A. TAHAPAN PELAKSANAAN JANGKA PENDEK				
1.	Terbentuknya Tim Efektif	Surat Tugas Tim Efektif	Minggu I Okt. 2018	
	• Konsultasi dan diskusi dengan mentor	Mendapat saran dan masukan untuk perbaikan		3 Okt 2018
	• Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Intern untuk koordinasi	Pemberitahuan keanggota Tim, pembuatan daftar hadir		3 Okt 2018
	• Pelaksanaan Rapat Internal pembentukan Tim Efektif dan pembagian tugas	Terbentuk Tim Efektif, dan pembagian tugas menjadi 2 Tim Kerja, yaitu Tim kerja Administratif dan Tim Kerja Teknis		4 Okt 2018
	• Membuat surat tugas mengenai pembentukan Tim Efektif	Surat Tugas ditandatangani Kapala Biro Persidangan I		5 Okt 2018
2.	Terwujudnya persamaan persepsi dan tersusunnya Rencana Kerja Tim Efektif	Surat Pernyataan dukungan	Minggu II Okt. 2018	

	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dan diskusi dengan Mentor 	Terkait mengenai rencana kerja Tim Efektif		9 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Tim Efektif 	Pemberitahuan keanggota Tim, pembuatan daftar hadir		9 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konsolidasi Tim Rapat Tim untuk menentukan sasaran dan capaian kerja 	Penyamaan persepsi terkait Proyek Perubahan		10 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh dukungan dari semua anggota Tim Efektif 	Penandatangan surat pernyataan dukungan		10 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kegiatan ke mentor 	Mendapat saran dan masukan		11 Okt 2018
3.	Terlaksananya kegiatan Klasifikasi data dan informasi dalam SIMAK KUNKER	Dokumen Kompilasi dan SIMAK KUNKER	Minggu III Okt. 2018 s.d Minggu I Nov 2018	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan Laporan Kunjungan Kerja yang sudah ditandatangani Ketua Tim 	Melakukan kompilasi hasil kunker secara bertahap		15 – 16 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi data Laporan Kunker. 	Melakukan kompilasi hasil kunker secara bertahap		17 – 18 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisa dan identifikasi data dan informasi 	Melakukan kompilasi hasil kunker secara bertahap		22 – 23 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • pengelompokan data/informasi sesuai mitra kerja Komisi V 	Melakukan kompilasi hasil kunker secara bertahap		22 – 24 Okt 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan input data dalam Matriks 	Melakukan kompilasi hasil kunker secara bertahap		31 Okt – 2 Nov 2018

4.	Tersedianya Pedoman Teknis mengenai penyusunan SIMAK KUNKER	Format dan dokumen teknis penyusunan SIMAK KUNKER	Minggu II Nov 2018	
	• Membuat Konsep Format dan panduan teknis penyusunan SIMAK KUNKER	Tim kerja Teknis membuat konsep Format		6 Nov. 2018
	• Melakukan pengelolaan dan penataan dokumen	Penataan dokumen dan membuat folder		8 Nov. 2018
	• Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian	Penataan dan pengarsipan dokumen		9 Nov. 2018
5.	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyampaian Matriks Hasil Kunker ke Mitra Kerja Komisi V	25 orang stake holder mengikuti sosialisasi	Minggu III dan IV Nov 2018	
	• Mempersiapkan pelaksanaan Rapat dengan Penghubung Mitra Kerja dan penghubung Perwakilan Pemda	Pemberitahuan ke para undangan, pembuatan daftar hadir		14 Nov 2018
	• Pelaksanaan Rapat dengan para Penghubung Mitra Kerja dan penghubung Perwakilan Pemda	Diikuti 25 orang		15 Nov 2018
	• Persiapan melakukan uji coba/pilot project kepada mitra kerja dan stakeholders	Membuat konsep surat untuk Mitra Kerja		21 Nov 2018
	• Menyampaikan SIMAK KUNKER ke Mitra Kerja Komisi V DPR RI dan melakukan konfirmasi	Mengirim surat dan lampiran ke Mitra Kerja Komisi V		22 Nov 2018
6.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut	Surat pernyataan komitmen keberlangsungan proyek perubahan	Minggu IV Nov 2018	
	• Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor	melaporkan kegiatan		22 Nov 2018

	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Tim Efektif 	Pemberitahuan keanggota Tim, pembuatan daftar hadir		22 Nov 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat mengenai monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lajut 	Saran dan masukan dari anggota		23 Nov 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat surat pernyataan komitmen keberlangsungan Proyek Perubahan 	Surat pernyataan komitmen keberlangsungan proyek telah ditandatangani		26 Nov 2018

Adapun uraian singkat mengenai pelaksanaan tahapan pada Jangka Pendek dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Milestone pertama “Terbentuknya Tim Efektif”

a. Hasil (output)

Tersedianya surat tugas dengan Nomor: 01-ST/KOM.V/DPR-RI/X/2018 mengenai pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Diklat Pim. IV "Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

b. Waktu Pelaksanaan

Minggu Pertama Bulan Oktober 2018, dimulai dari tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018.

c. Evidence

Notulensi, Daftar hadir, dan photo dokumentasi

d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Pada tahapan ini, diawali dengan project leader melakukan konsultasi dan diskusi terlebih dahulu dengan Mentor tentang rencana pembentukan Tim Efektif yang nantinya akan membantu project leader untuk melaksanakan kegiatan proyek perubahan. Dalam hal ini Mentor memberikan saran, masukan serta persetujuan terhadap pembentukan Tim Efektif (3 Oktober 2018).

- 2) Tim Kerja Administratif melakukan persiapan sebelum pelaksanaan rapat dengan membuat daftar hadir, memesan snack, dan menyampaikan pemberitahuan rapat/menginformasikan kepada semua anggota tim efektif (3 Oktober 2018).
- 3) Selanjutnya dilakukan Rapat Internal untuk pembentukan Tim Efektif, dimana rapat ini dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para staf sub bagian tata usaha, para staf sub bagian rapat dan para tenaga ahli Komisi V DPR RI. Dalam rapat internal ini juga telah disepakati pembagian tugas untuk masing-masing anggota tim efektif dan Tim Kerja Teknis membuat notulensi hasil pertemuan serta membuat dokumentasi (4 Oktober 2018).
- 4) Pembuatan Surat Tugas Tim Efektif oleh Tim Kerja Administratif dan diasistensi oleh project Leader, kemudian disampaikan ke Kabag Sekretariat Komisi V selaku mentor untuk diteruskan ke Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI guna ditandatangani. (5 Oktober 2018)

2. Milestone kedua “Terwujudnya persamaan persepsi dan tersusunnya Rencana Kerja Tim Efektif”

a. Hasil (output)

Tersedianya surat pernyataan dukungan dari anggota Tim Efektif yang dinyatakan dengan penandatangan surat pernyataan dukungan.

b. Waktu Pelaksanaan

Minggu Kedua Bulan Oktober 2018, dimulai dari tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018.

c. Evidence

Notulensi, Daftar hadir, dan photo dokumentasi

d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Project leader melakukan konsultasi dengan Mentor tentang rencana kerja dan kegiatan Tim Efektif untuk penyelesaian proyek perubahan, mengingat pada minggu ke 2 bulan Oktober, Komisi V DPR RI masih ada kegiatan rapat-rapat Komisi V dan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik, sehingga harus menggunakan waktu seefektif mungkin agar tidak mengganggu kegiatan yang ada di Komisi V (9 Oktober 2018)
- 2) Tim Kerja Administratif melakukan persiapan sebelum pelaksanaan rapat dengan menyiapkan daftar hadir, memesan snack dan menyampaikan pemberitahuan/menginformasikan kepada semua anggota Tim Efektif (9 Oktober 2018)
- 3) Melakukan rapat Tim Efektif untuk konsolidasi dan penyamaan persepsi, dimana dalam rapat tersebut project leader memberikan penjelasan dan gambaran mengenai proyek perubahan yang akan dilakukan kepada semua anggota Tim Efektif sehingga semua anggota mempunyai gambaran yang utuh dan memiliki pemahaman yang sama terhadap proyek perubahan yang selanjutnya diwujudkan dengan memberikan pernyataan dukungan agar setiap tahapan-tahapan yang ada pada proyek perubahan ini dapat diselesaikan dan terlaksana tepat waktu. Tim Kerja Teknis membuat notulen hasil pertemuan serta membuat dokumentasi. (10 Oktober 2018)
- 4) Dilakukan penandatanganan dokumen pernyataan dukungan oleh semua anggota Tim Efektif. (10 Oktober 2018)
- 5) Melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan pada tahapan ini kepada Mentor. (11 Oktober 2018)

3. Milestone ketiga “Terlaksananya Kegiatan Klasifikasi data dan informasi dalam SIMAK KUNKER”

a. Hasil (output)

Tersedianya dokumen dan data mengenai kompilasi hasil temuan kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 yang telah disusun sesuai mitra kerja Komisi V DPR RI.

b. Waktu Pelaksanaan

Minggu Ketiga bulan Oktober 2018 sampai dengan Minggu pertama bulan November 2018, dimulai dari tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018.

c. Evidence

Dokumen dan photo dokumentasi

d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Tim Kerja Teknis pengumpulan Laporan Hasil Kunjungan Kerja yang telah dilakukan oleh Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 yang telah memperoleh persetujuan dan telah ditandatangani oleh Ketua Tim. Pengumpulan laporan kunjungan kerja ini dilakukan secara bertahap mengingat kunjungan kerja pelaksanaan waktunya berbeda-beda. Setelah laporan kunjungan kerja dibuat, maka akan disampaikan kepada masing-masing ketua Tim untuk dibaca dan dikoreksi terlebih dahulu selanjutnya akan dimintakan tandatangan sebagai persetujuan. (15 – 16 Oktober 2018)
- 2) Selanjutnya Tim Kerja Teknis melakukan inventarisasi, mengumpulkan, dan mengolah data mengenai hasil temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Kunjungan Kerja. Data tersebut dianalisa dan diidentifikasi, mana dari hasil temuan dan rekomendasi tersebut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan mana yang menjadi kewenangan dari mitra kerja Komisi V DPR RI. (17 – 23 Oktober 2018)

- 3) Setelah itu, data dan informasi mengenai temuan dan rekomendasi Tim yang telah dianalisis tersebut dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi V DPR RI, yaitu bidang infrastruktur (ruang lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), bidang transportasi (ruang lingkup Kementerian Perhubungan), bidang daerah tertinggal dan transmigrasi (ruang lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), bidang klimatologi dan geofisika (ruang lingkup Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), bidang pencarian dan pertolongan (ruang lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), dan bidang pengembangan wilayah Surabaya – madura (ruang lingkup Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura). (22 – 24 Oktober 2018)
 - 4) Tim Kerja Tenis membuat konsep format Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V, dan selanjutnya melakukan input terhadap data dan informasi yang telah dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi V DPR RI kedalam Matriks tersebut. (31 Oktober – 2 November 2018)
- 4. Milestone keempat “Tersusunnya pedoman teknis penyusunan Matriks Hasil Kunjungan Kerja”**
- a. Hasil (output)

Tersedianya format dan dokumen mengenai pedoman teknis penyusunan Matriks Hasil Kunjungan Kerja
 - b. Waktu Pelaksanaan

Minggu Kedua bulan November 2018, dimulai dari tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018.
 - c. Evidence

Dokumen dan photo dokumentasi
 - d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Tim Kerja Teknis membuat konsep panduan teknis mengenai penyusunan dan pembuatan Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, yang berisi petunjuk dan langkah-langkah sehingga nantinya akan memudahkan dalam melakukan input data dan informasi ke dalam Sistem Matriks Hasil Kunker (6 November 2018).
- 2) Data dan informasi yang telah diinput ke dalam Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI selanjutnya ditata dan dikelola serta diarsipkan ke dalam folder sehingga memudahkan apabila suatu saat diperlukan. (8 November dan 9 November 2018)

5. Milestone kelima “Terlaksananya sosialisasi dan penyampaian Matriks Hasil Kunjungan Kerja ke Mitra Kerja Komisi V”

a. Hasil (output)

Sebanyak 25 orang stake holder yang terdiri dari mitra kerja komisi V dan penghubung kantor perwakilan pemerintah daerah mengikuti sosialisasi mengenai proyek perubahan

b. Waktu Pelaksanaan

Minggu Ketiga dan minggu keempat bulan November 2018, dilakukan mulai tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018.

c. Evidence

Surat pernyataan dukungan, notulensi, daftar hadir, dan photo dokumentasi

d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Tim Kerja Administratif melakukan persiapan pelaksanaan rapat dengan menginformasikan kepada seluruh penghubung mitra kerja Komisi V DPR RI dan penghubung perwakilan pemda terkait rencana sosialisasi mengenai proyek perubahan, menyiapkan daftar hadir, memesan snack dan menyampaikan pemberitahuan rapat/menginformasikan kepada semua anggota Tim Efektif. (14 November 2018)

- 2) Melakukan rapat dengan penghubung mitra kerja dan penghubung perwakilan pemda dalam rangka untuk sosialisasi mengenai proyek perubahan. Dalam hal ini mentor dan project leader menyampaikan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai proyek perubahan yang sedang dilaksanakan saat ini sehingga dapat terjalin sinergi dan kerja sama yang baik untuk dapat mengimplementasikan proyek perubahan ini, dan juga meminta dukungan dari mitra kerja dan stakeholder terkait agar pelaksanaan dan penyelesaian proyek perubahan ini dapat terlaksana sesuai jadwal. Tim Kerja Teknis membuat notulen hasil pertemuan serta membuat dokumentasi. (15 November 2018)
- 3) Meminta dukungan dari stake holder yang diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan dari stake holders.
- 4) Tim Kerja Administratif membuat konsep surat mengenai penyampaian Laporan Hasil Kunjungan kerja yang telah ditandatangani Ketua Tim dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V kepada semua mitra kerja Komisi V. (21 November 2018)
- 5) Surat yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI selanjutnya disampaikan kepada semua Mitra Kerja Komisi V dengan dilampirkan Laporan Hasil Kunjungan Kerja dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V untuk dapat segera direspon dan ditanggapi oleh mitra kerja Komisi V. (22 November 2018)
- 6) Setelah surat, Laporan Hasil Kunjungan Kerja dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI tersebut dikirimkan ke semua mitra kerja, maka Tim Kerja Administratif akan melakukan konfirmasi kepada penghubung mitra kerja Komisi V DPR RI untuk memastikan kembali bahwa surat beserta lampirannya telah diterima. (22 November 2018)

6. Milestone keenam “Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut”

a. Hasil (output)

Adanya surat pernyataan komitmen mengenai keberlangsungan proyek perubahan dari pejabat yang berwenang.

b. Waktu Pelaksanaan

Minggu keempat bulan November 2018, dilakukan tanggal 22 November 2018 dan tanggal 23 November 2018)

c. Evidence

Surat pernyataan komitmen keberlangsungan proyek kegiatan, notulensi, daftar hadir, dan photo dokumentasi

d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Project Leader melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor mengenai monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut dari proyek perubahan ini serta melaporkan kepada Mentor sejauhmana tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dan diselesaikan. (22 November 2018)
- 2) Tim Kerja Administratif melakukan persiapan pelaksanaan rapat dengan menyiapkan daftar hadir, memesan snack dan menyampaikan pemberitahuan rapat/menginformasikan kepada semua anggota Tim Efektif (22 November 2018)
- 3) Dilaksanakan rapat Tim Efektif untuk membahas mengenai monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan dari proyek perubahan, dalam hal ini project leader menyampaikan kegiatan dan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan dalam penyelesaian proyek perubahan oleh Tim Efektif. Tim Kerja Teknis membuat notulen hasil pertemuan serta membuat dokumentasi. (23 November 2018).

- 4) Membuat surat pernyataan komitmen keberlangsungan proyek perubahan dan menyampaikannya kepada pejabat yang bersangkutan guna memperoleh tanda tangan.

7. Milestone ketujuh “Terlaksananya pembuatan Laporan Proyek Perubahan”

a. Hasil (output)

Adanya Laporan Proyek Perubahan untuk seminar Laboratorium Kepemimpinan.

b. Waktu Pelaksanaan

Minggu keempat bulan November 2018 sampai dengan awal Desember 2018, dilakukan tanggal 26 November 2018 sampai 4 Desember 2018)

c. Evidence

Laporan Proyek Perubahan, dokumentasi

d. Proses (uraian kegiatan)

- 1) Project Leader melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor mengenai tahapan-tahapan yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan mengenai implementasi jangka pendek dari proyek perubahan. (26 November 2018)
- 2) Melengkapi data dan dokumen pendukung terkait sebagai kelengkapan untuk pembuatan Laporan Proyek Perubahan.
- 3) Melakukan konsultasi dengan Coach mengenai implementasi proyek perubahan dan persiapan untuk pelaksanaan seminar akhir pada bulan Desember 2018.

Tahapan Pelaksanaan Jangka Menengah

Pentahapan (milestones) untuk jangka menengah, akan dilakukan kegiatan dan rencana kerja sebagai berikut:

No.	Milestone	Kegiatan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
a.	Penerapan Sistem Matriks Hasil Kunker yang berisi Data dan Informasi terverifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi data dan checklist data• Menyampaikan ke Pimpinan dan Anggota Komisi Penggunaan data dan informasi untuk melakukan pengawasan	Project Leader	Minggu III Desember '18 s.d Minggu II Februari '19	Laporan dokumen
b.	Tersedianya Klasifikasi data dan informasi dalam Sistem Matriks Hasil Kunker secara berkala	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan analisa dan mengidentifikasi data/ informasi• Melakukan pengkinian data dan informasi• Melakukan Bimtek untuk pegawai	Project Leader	Minggu III Februari '19 sd Minggu II Maret '19	Laporan dokumen
c.	Terlaksananya penyempurnaan & penyebarluasan informasi kepada stakeholder	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan upload data dan informasi di website• Menginformasikan dan sosialisasi kepada stake holders	Project Leader	Minggu II Maret sd Minggu IV Maret '19	Laporan dokumen

Tahapan Pelaksanaan Jangka Panjang

Pentahapan (milestones) untuk jangka panjang, akan dilakukan kegiatan dan rencana kerja sebagai berikut:

No.	Milestone	Kegiatan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
a.	Evaluasi dan Monitoring secara optimal dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Mengagendakan rapat untuk evaluasi hasil kunjungan kerja secara berkelanjutan Melakukan pengkinian data dan informasi secara berkala Membuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi 	Project Leader	Minggu I Mei '19 sd Minggu IV Mei '20	Laporan dokumen

B. TARGET CAPAIAN JANGKA PENDEK

Capaian proyek perubahan adalah merupakan hasil dari sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Proyek Perubahan (RPP).

Berdasarkan hasil Implementasi proyek perubahan dengan judul "SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI" diperoleh capaian hasil jangka pendek proyek perubahan sebagai berikut:

Milestone 1: Terbentuknya Tim Efektif

No	Waktu	Kegiatan	Target	Output	Ket
1.	4 Okt 2018	Rapat Internal	Pembentukan Tim Efektif	Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Biro Persidangan I dgn Nomor:01/ST/Kom-V/DPR RI/X/2018 tanggal 5 Okt 2018	Tercapai 100%

Milestone 2: Terwujudnya persamaan persepsi dan tersusunnya rencana kerja Tim Efektif

No	Waktu	Kegiatan	Target	Output	Ket
1.	10 Okt 2018	Rapat Internal Tim Efektif	Terwujudnya persamaan persepsi dan tersusunnya rencana Kerja Tim Efektif	Surat Pernyataan Dukungan dari anggota Tim Efektif	Tercapai 100%

Milestone 3: Terlaksananya kegiatan klasifikasi data dan informasi dalam SIMAK KUNKER

No	Waktu	Kegiatan	Target	Output	Ket
1.	18 Okt 2018 - 2 Nov. 2018	Melaksanakan inventarisasi, menganalisis, dan mengolah data selanjutnya temuan dan rekomendasi hasil kunker dikelompokan sesuai mitra kerja dan diinput ke dalam Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI	Terlaksananya kegiatan klasifikasi data dan informasi dalam SIMAK KUNKER	Tersedianya dokumen SIMAK KUNKER pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019	Tercapai 100%

Milestone 4: Tersusunnya pedoman teknis penyusunan SIMAK KUNKER

No	Waktu	Kegiatan	Target	Output	Ket
1.	6 Nov. 2018	Membuat konsep Panduan Teknis mengenai penyusunan dan pembuatan SIMAK KUNKER	Tersusunnya pedoman teknis penyusunan SIMAK KUNKER	Tersedianya format dan dokumen mengenai pedoman teknis penyusunan SIMAK KUNKER	Tercapai 100%

Milestone 5: Terlaksananya sosialisasi dan penyampaian SIMAK KUNKER ke Mitra Kerja Komisi V DPR RI

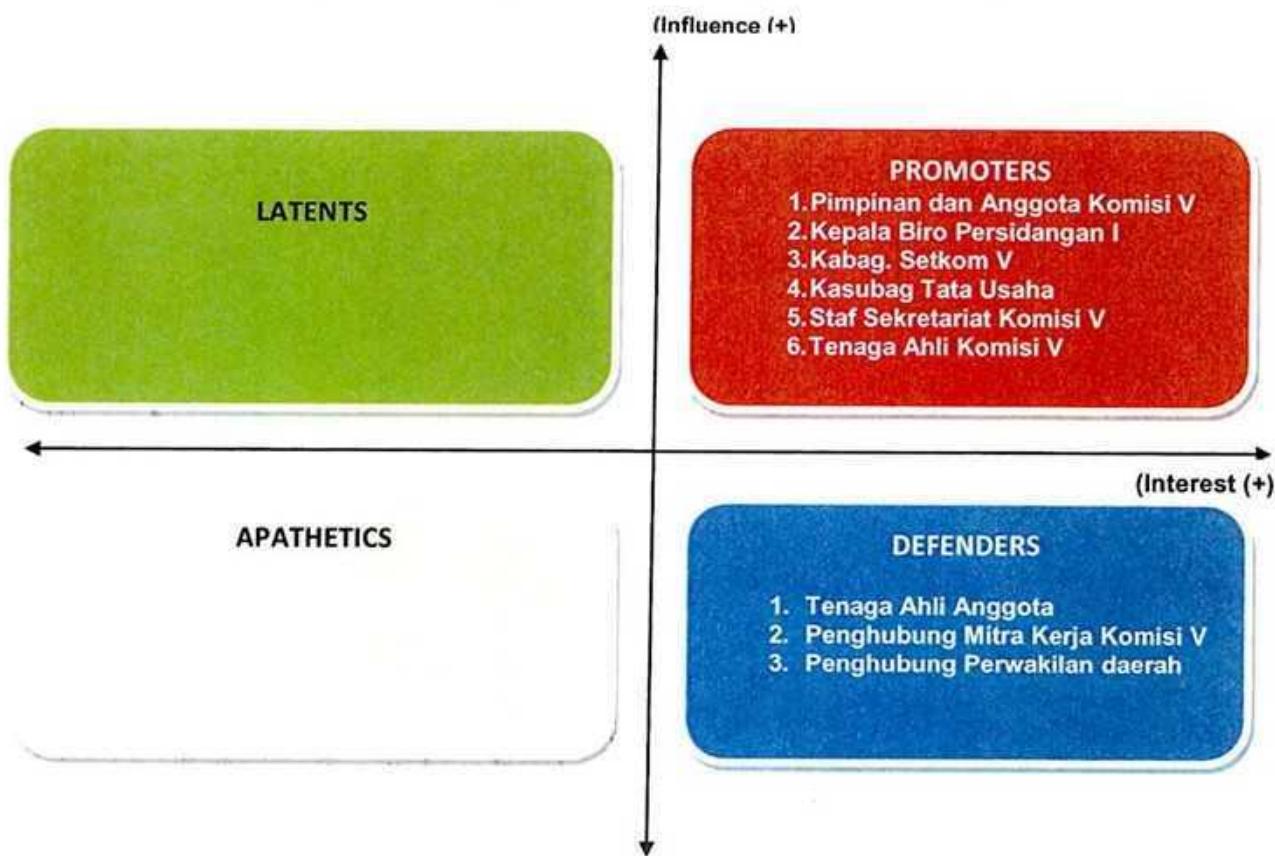
No	Waktu	Kegiatan	Target	Output	Ket
1.	15 Nov. 2018	Melaksanakan rapat dengan penghubung mitra kerja Komisi V dan penghubung kantor perwakilan pemerintah daerah	Terlaksananya sosialisasi mengenai SIMAK KUNKER ke penghubung mitra Kerja dan penghubung kantor perwakilan daerah	Sebanyak 25 orang stakeholder mengikuti sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari Mitra Kerja Komisi V	Tercapai 100%
2.	22 Nov. 2018	Menyampaikan Laporan Kunjungan Kerja dan SIMAK KUNKER ke Mitra Kerja Komisi V	Terlaksananya penyampaian SIMAK KUNKER ke Mitra Kerja Komisi		

Milestone 6: Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta rencana tindaklanjut

No	Waktu	Kegiatan	Target	Output	Ket
1.	15 Nov. 2018	Melaksanakan rapat dengan penghubung mitra kerja Komisi V dan penghubung kantor perwakilan pemerintah daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut	Adanya surat pernyataan komitmen mengenai keberlangsungan proyek perubahan dari Kepala Biro Persidangan I	Tercapai 100%

C. PERUBAHAN PETA STAKE HOLDERS

*Window Stakeholders Setelah implementasi proyek perubahan
(Kuadran Pengaruh dan Dukungan Stakeholders)*



D. KENDALA/MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA

NO	KENDALA/MASALAH	RESIKO	STRATEGI MENGATASI KENDALA/MASALAH
1.	Kurangnya Kerja sama dari Tim karena ada tugas pokok yang harus dikerjakan.	Target penyelesaian proyek perubahan pada jangka pendek tidak sesuai jadwal/tidak tepat waktu	Mengembangkan metode pola komunikasi secara persuasif kepada staf dan stakeholder internal

2.	Keterbatasan waktu dalam penyelesaian proyek perubahan dikarenakan adanya kegiatan rapat-rapat dan kegiatan kunjungan kerja yang waktunya bersamaan	Tidak tercapainya target waktu penyelesaian proyek perubahan	Melakukan koordinasi dan menyusun kegiatan proyek perubahan yang disesuaikan dengan kegiatan rapat-rapat sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik
3.	Lambatnya respon dan tanggapan dari Mitra Kerja Komisi V terhadap Matriks yang sudah disampaikan	Tidak tercapainya target waktu penyelesaian proyek perubahan	Melakukan Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Stakeholder Eksternal secara intensif agar tujuan dari proyek perubahan ini dapat dicapai.

E. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

- Kriteria Keberhasilan

Beberapa kriteria yang menandakan keberhasilan pencapaian hasil proyek perubahan, yaitu:

- 1) Terbentuknya Tim Efektif dengan Surat Tugas dari Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI.
- 2) Tersosialisasinya SIMAK KUNKER kepada stake holders.
- 3) Tersedianya SIMAK KUNKER dan telah dilaksanakannya penyampaian SIMAK KUNKER ke Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
- 4) Telah tersedianya format dan pedoman teknis penyusunan SIMAK KUNKER.

- Faktor Kunci Keberhasilan

Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian hasil proyek perubahan, yaitu :

- 1) Komitmen, motivasi yang tinggi serta integritas dari para anggota Tim Efektif untuk menyelesaikan dan melaksanakan proyek perubahan.

- 2) Terjalinnya komunikasi yang baik dan efektif dengan stakeholders.
- 3) Pengelolaan waktu dan kegiatan yang baik;
- 4) Keberlangsungan kegiatan yang berjalan sesuai rencana dan target waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, kriteria keberhasilan juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari para stakeholder serta berdasarkan pengamatan Project Leader diperoleh bahwa adanya pandangan stakeholder atas proyek perubahan SIMAK KUNKER sangat membantu dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan kinerja di instansi kerja.

F. LEADERSHIP LESSONS LEARNED

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari proyek perubahan, project leader menemukan adanya kendala, baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi. Sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi seperti kurangnya kerja sama dari Tim karena adanya tugas pokok yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan, keterbatasan waktu dalam penyelesaian proyek perubahan dikarenakan adanya kegiatan rapat-rapat dan kegiatan kunjungan kerja yang waktunya bersamaan, dan juga lambatnya respon dan tanggapan dari Mitra Kerja Komisi V terhadap Matriks Hasil Kunjungan Kerja yang telah disampaikan. Hal ini tentu memerlukan strategi untuk mengatasi beberapa kendala yang muncul supaya hambatan tersebut dapat diselesaikan oleh project leader dan tidak menjadi penghalang bagi keberhasilan dalam sebuah organisasi.

Seperti halnya dengan pembentukan tim efektif, project leader memperoleh pembelajaran diantaranya sebagai berikut:

1. Tim Efektif dibentuk untuk membantu penyelesaian tugas, membantu memecahkan setiap masalah yang bersifat jangka pendek, yang tidak mampu atau pun sulit dipecahkan secara personal.
2. Keberhasilan Tim Efektif dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas sangat membutuhkan kombinasi keterampilan, pengalaman, pengetahuan,

- kecerdasan, dan energi yang saling bersinergi dan melengkapi.
3. Tim Efektif yang berkualitas akan selalu sadar bahwa keberadaan mereka di dalam tim adalah untuk mendukung semua unit kerja, peran kerja, fungsi kerja, dan aspek kerja di dalam organisasi.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja organisasi bergantung pada faktor manajemen dan faktor manusia. Manusia sebagai penggerak dalam suatu organisasi/manajemen khususnya pada struktur organisasi profesional akan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Aspek kepemimpinan dan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor kunci bagi kelangsungan aktivitas suatu organisasi karena pada hakikatnya di dalam organisasi itu sendiri terjadi proses kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi. Begitu halnya dengan proses pelaksanaan proyek perubahan SIMAK KUNKER, faktor kunci keberhasilannya untuk mencapai kinerja organisasi yang efektif dan efisien tertumpu pada kemauan untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati walaupun menghadapi berbagai kendala dan hambatan akan tetapi dengan kerjasama tim yang solid dapat mewujudkan tujuan dari proyek perubahan ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi proyek perubahan "SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyek perubahan "SIMAK KUNKER" ini telah terlaksana dengan baik karena adanya arahan, bimbingan dan dorongan dari Mentor, Coach, serta kerjasama yang baik dari Tim Efektif dan stakeholders.
2. Melalui "SIMAK KUNKER" akan tersedia data dan informasi mengenai temuan, permasalahan, dan rekomendasi dari hasil Kunjungan Kerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi V DPR RI, yang sudah tersusun dan dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi V DPR RI.
3. Dengan adanya "SIMAK KUNKER" diharapkan Anggota Komisi V DPR RI akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memantau terhadap temuan, permasalahan, dan rekomendasi selama Kunjungan Kerja yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan secara optimal.
4. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, namun demikian karena tujuan proyek ini terdapat jangka menengah dan jangka panjang maka semua kekurangan akan terus diperbaiki di waktu mendatang tentunya dengan komitmen yang kuat dari pemimpin perubahan dan dukungan para stakeholder.

B. SARAN/REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi setelah implementasi proyek perubahan ini adalah:

1. Untuk keberlangsungan "SIMAK KUNKER" kedepannya perlu adanya sosialisasi dan penyampaian informasi yang berkelanjutan kepada anggota Komisi V DPR RI pada khususnya, dan anggota DPR RI pada umumnya, mengingat setiap 5 (lima) tahun sekali akan ada pergantian anggota DPR RI sesuai hasil Pemilu Legislatif.
2. Perlu menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan penghubung mitra kerja Komisi V DPR RI, agar semua mitra kerja Komisi V dan stakeholders memperoleh informasi dan memperoleh manfaat dari proyek perubahan ini.
3. Perlu dibuat suatu Pedoman yang mengatur mengenai mekanisme penyampaian ke Pemerintah dan batas waktu Pemerintah menyampaikan kembali SIMAK KUNKER sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif.
4. Kedepannya perlu ditunjuk satu pegawai/staf yang khusus untuk menangani "SIMAK KUNKER" agar dapat terus berkelanjutan, dengan selalu meningkatkan kemampuan pegawai yang bersangkutan melalui pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
- Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV;
- Bahan Ajar, Berpikir Kreatif dan Inovasi, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Bahan Ajar, Diagnostic Reading, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Bahan Ajar, Agenda Self Mastery Integritas, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Bahan Ajar, Pengenalan Potensi Diri, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Bahan Ajar, Pilar-Pilar Kebangsaan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Bahan Ajar, Membangun Tim Efektif, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2015

LAMPIRAN

TAKING OWNERSHIP



Photo 1. Reformer melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor mengenai Rencana Proyek Perubahan dan Kesepakatan mengenai Area Perubahan



Photo 2. Reformer melakukan konsultasi dan diskusi dengan Couch mengenai Rencana Proyek Perubahan



Photo 3. Photo bersama rekan kelompok setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan Couch mengenai Rencana Proyek Perubahan



Photo 4. Reformer melakukan konsultasi dan diskusi dengan Couch mengenai Penyusunan Proyek Perubahan



Kotak Masuk

D

Dhany Kunarto

24 Sep

Selamat Sore Bapak, Maaf kalau mengganggu, saya Kunarto, peserta Diklat

S

Suharyoto Haryoto

ke saya

Kemarin dulu Tampilkan

Pak Kun...

Coba digali lagi tentang output yg akan dihasilkan! Apakah hanya berbentuk format matrikulasi saja atau juga ada pedoman pengisiannya; termasuk juga pedoman/juknis/SOP penyampaiannya ke komisi shg menjadi alat bagi siapa saja yg akan bertugas di bagianya pak Kunm

Termasuk didalamnya ada tidak ada kegiatan untuk capacity building bagi petugas atau pihak2 yg berkepentingan untuk melaksanakan hal2 yg terkait dgn penyusunan matrikulasi yg dibuat dlm proper ini. Besuk tgl 26 kita bahas lagi.

Tks.

Dikirim dari Yahoo Mail di Android

Pada Sen, 24 Sep 2018 pada 17:16, Dhany Kunarto <dhanykunarto@gmail.com> menulis:

Selamat Sore Bapak, Maaf kalau mengganggu, saya Kunarto, peserta Diklat Pim IV Setjen DPR

Photo 5. Reformer melakukan konsultasi dengan Couch mengenai Penyusunan Proyek Perubahan melalui email

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Persetujuan oleh Coach

FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

1. Nama Peserta	: Kunarto, S.Sos
2. Unit Kerja	: Sekretariat Komisi V DPR RI
3. Gagasan Perubahan	: Optimalisasi Laporan Kunjungan Kerja untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan

Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta

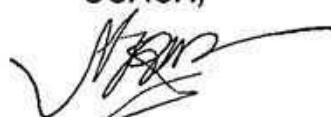
Perlu ada selisih antara gagasan peserta fungsi RI yang ada dengan yang terpanah yg jelas - Analisis SHT tidak jadi baru ini untuk ngelepas be proses

Rekomendasi

Jangkt

Jakarta, September 2010

COACH,



(Dr. Ir. Suharyoto, MS)

Lampiran 2. Formulir Persetujuan oleh Mentor

FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

1. Nama Peserta	: Kunarto, S.Sos
2. Unit Kerja	: Sekretariat Komisi V DPR RI
3. Gagasan Perubahan	: Optimalisasi Laporan Kunjungan Kerja untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Rekomendasi	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p style="text-align: right;">Jakarta, 10 September 2018</p> <p>MENTOR,</p> <p></p> <p>(Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi)</p>	

**Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

PESERTA

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN COACH
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV**

Nama : Kunarto, S.Sos

Nama Coach : Dr. Ir. Suharyoto, M.S

NIP : 197310161994031002

Jabatan : Kasubaq. Rapat Komisi V DPR RI

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	16-9-2018	Diagnosis Reading	Tatap muka		A
2	24-9-2018	Latar Belakang RPP	Surat elektronik		P
3	26.9.2018	merancang RPP	Tatap muka		P
4	26-9-2018	Identifikasi stakeholder	tatap muka		P
5	27-9-2018	Time schedule	tatap muka		P
6	28-10-2018	membahas laporan	Surat elektronik		P
7	3-12-2018	Konsultasi Laporan Seminar Laboratorium	Tatap muka		P
8	4-12-2018	Konsultasi Laporan Seminar laboratorium	Tatap muka		P
9					
10					
11					
12					

(*) Pembimbing yang sah adalah pembimbing yang ditandatangani oleh *Coach*

Kepala Bidang Pelaksanaan Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV**

Nama : Kunarto, S.Sos Nama Mentor : Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
NIP : 197310161994031002
Jabatan : Kasubag. Rapat Komisi V DPR RI

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu/Permasalahan yang dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	6 Sept '18	Burning Flatform.	Tatap muka		Per
2	7 Sept '18.	membahas Tim Efektif	Tatap muka		Per
3	3 Okt '18	konsultasi mengenai pembentukan Tim Efektif	Tatap muka		Per
4	5 Okt '18	Persandanganan Nota Curat Tugas Tim	Tatap muka		Per
5	9 Okt '18	Konsultasi mengenai Rencana Kegiatan RPP	Tatap muka		Per
6	11 Okt '18	Melakukan Kegiatan yg nntah dilakukan	Tatap muka		Per
7	2 Nov '18	Konsultasi mengenai Laporan Hasil Kunker	Tatap Muka		Per
8	14 Nov '18	Konsultasi terkait Rencana Finalisasi RPP	Tatap Muka		Per
9	22 Nov '18	Konsultasi & melakukan perkembangan kegiatan	Tatap Muka		Per
10	26 Nov '18	Konsultasi & diskusi serta persetujuan laporan	Tatap Muka		Per
11					
12					
13					
14	Dst ..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

LAMPIRAN
MILESTONES 1



Photo 6. Reformer melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor



Photo 7. Rapat untuk pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan



Photo 8. Tim Kerja Administratif membuat dan menyiapkan daftar hadir, dan konsep surat



Photo 9. Tim Kerja Administratif membuat dan menyiapkan surat memo dan surat undangan



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOTULENSI DAN CATATAN
RAPAT TIM EFEKTIF

A. Tujuan

Rapat Tim Efektif dilaksanakan dalam rangka membentuk Tim Efektif untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan.

B. Waktu

Rapat dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Oktober 2018

Jam : 15.00 WIB s.d 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi V

C. Peserta Rapat

Rapat diikuti oleh Kabag, Kasubag Rapat, Kasubag Tata Usaha, Staf Subbag. Rapat, Staf Subbag Tata Usaha, Tenaga Ahli Komisi V

D. Hasil/Keputusan Rapat

1. Untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilakukan oleh Kasubag. Rapat sebagai *Reformer*, maka perlu dibentuk "Tim Efektif" yang keanggotaannya terdiri dari Kabag. Komisi V, Kasubag. Rapat, Kasubag Tata Usaha, Staf Subbag Tata Usaha, Staf Subbag Rapat, dan Tenaga Ahli Komisi V.
2. Sebagai dasar pembentukan "Tim Efektif" akan dibuatkan Surat Tugas.
3. "Tim Efektif" yang dibentuk dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Tim Kerja Administratif dan Tim Kerja Teknis.
4. Tim Kerja Administratif bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pada setiap tahapan proyek perubahan.
5. Tim Kerja Teknis bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan substansi setiap tahapan proyek perubahan.

E. Penutup

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

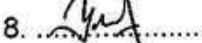
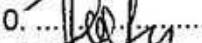


DAFTAR HADIR

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Tim Efektif
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Oktober 2018
Pukul : 15.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi V
Acara : - Koordinasi dan pembentukan tim efektif :

Jumlah Hadir :

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dra. Prima MB, Nuwa, Msi	Kepala Bagian	1. 
2	Kunarto, S. Sos	Kasubbag Rapat	2. 
3	Nunik Prihatin Budi Astuti, SH	Kasubbag Tata Usaha	3. 
4	Dyah Renowati, S.Sos	Analisis Data & Informasi	4. 
5	Nina Herlina, SH	Analisis Tata Usaha	5. 
6	Muhammad Sodik, SE	Pengadministrasi Umum	6. 
7	Aris Munandar	Pengadministrasi Rapat	7. 
8	Muhammad Subqi	Pengelola Persidangan	8. 
9	Ria Damayanti	Pegolah Data	9. 
10	Misna Parman	Pengadministrasi Umum	10. 
11	M. Hasbi Azis	Tenaga Ahli Komisi V	11. 
12	Hendro Wibowo	Tenaga Ahli Komisi V	12. 

NO.	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
13	Dimas Dipoyono	Tenaga Ahli Komisi V	13. <u>Dimas</u>
14	Adi Setiawan	Tenaga Ahli Komisi V	14. <u>Adi</u>
15	Salihuddin	Tenaga Ahli Komisi V	15. <u>Salih</u>
16	16.
17	17.
18	18.
19	19.
20	20.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : 014/PS.05/10/2018

Yth. : Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI
Dari : Kepala Bagian Set. Komisi V DPR RI
Hal : Permohonan tanda tangan Surat Tugas
Tanggal : 5 Oktober 2018

Terlampir kami sampaikan dengan hormat Surat Tugas mengenai Pembentukan Tim Efektif untuk membantu dan mendukung pelaksanaan proyek perubahan Sdr. Kunarto, S.Sos.

Apabila tidak ada koreksi, mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Surat Tugas dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kabag.set. Komisi V DPR RI

Dra. Prima M.B. Nuwa, Msi
NIP. 196105271992032001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 01-ST/KOM.V/DPR-RI/X/2018

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan profesionalisme serta kompetensi kepemimpinan para Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan Diklat Pim. Tk. IV pada tanggal 20 Agustus s.d 8 Desember 2018 bertempat di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Bogor;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/ 10/6/200 1 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

Dengan ini Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, memberi tugas kepada :

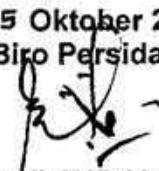
NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dra. Prima MB, Nuwa, Msi	196105271992032001	Kepala Bagian .
2	Kunarto, S. Sos	197310161994031002	Kepala Subbag Rapat
3	Nunik Prihatin Budi Astuti, SH	196912021998032002	Kepala Subbag Tata Usaha
4	Dyah Renowati, S.Sos	197108251991022001	Analis Data dan Informasi
5	Nina Herlina, SH	197910152005022001	Analis Tata Usaha
6	Muhamad Sodik, SE	196512271988031002	Pengadministrasi Umum
7	Aris Munandar	196812271989031005	Pengadministrasi Rapat
8	Muhamad Subqi	196611251992031002	Pengelola Persidangan
9	Ria Damayanti	198001042005022001	Pegolah Data
10	Misna Parman	196908162003121003	Pengadministrasi Umum
11	M. Hasbi Azis		Tenaga Ahli Komisi V
12	Hendro Wibowo		Tenaga Ahli Komisi V
13	Dimas Dipoyono		Tenaga Ahli Komisi V

NO.	N A M A	NIP	JABATAN
14	Adi Setiawan		Tenaga Ahli Komisi V
15	Salihuddin		Tenaga Ahli Komisi V

Untuk : melaksanakan tugas dan mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklat Pim Tk. IV Sdr. Kunarto, S.Sos, dengan judul "Sistem Matriks Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI" agar nantinya dapat diimplementasikan di instansi dan unit kerja.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 5 Oktober 2018
Kepala Biro Persidangan I


M. DIMYATI SUDJA, S.Sos., M.Si.
NIP. 195909101980031005

LAMPIRAN
MILESTONES 2



Photo 10. Reformer melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor

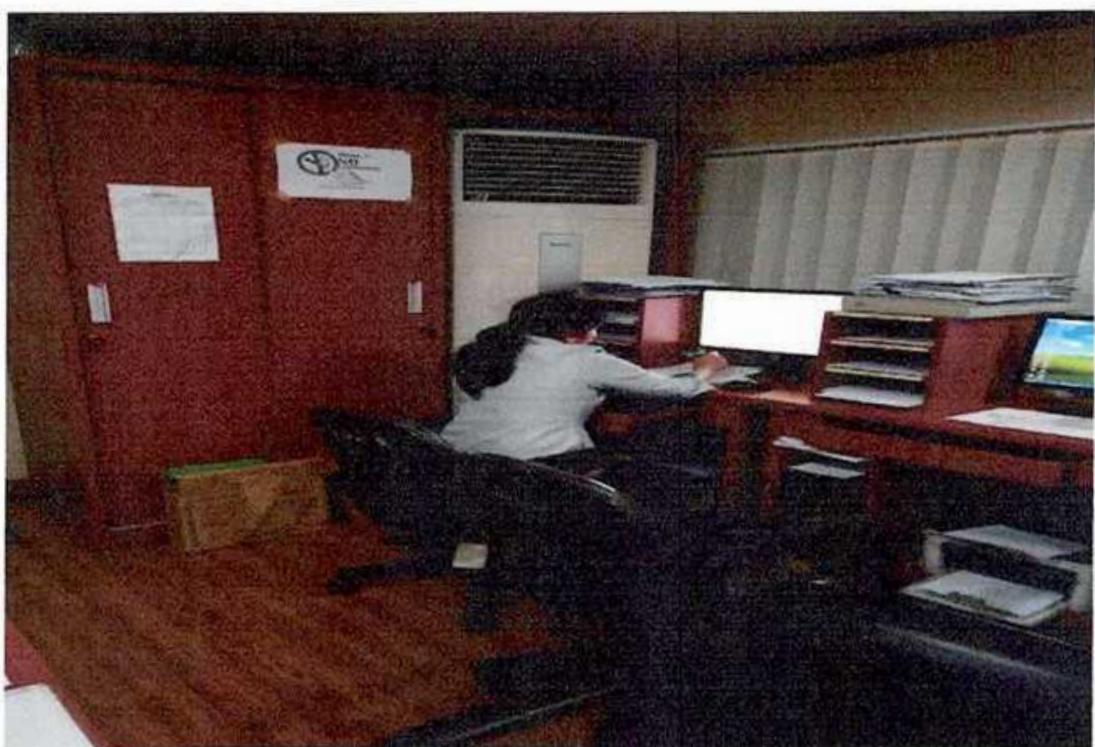


Photo 11. Tim Kerja Administratif membuat dan menyiapkan surat memo dan surat



Photo 12. Rapat Tim Efektif untuk melakukan konsolidasi, penyamaan persepsi, dan dilanjutkan dengan penandatangan surat pernyataan dukungan



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOTULENSI DAN CATATAN
RAPAT TIM EFEKTIF

A. Tujuan

Rapat Tim Efektif dilaksanakan dalam rangka untuk konsolidasi, penyesuaian jadwal kegiatan, dan penandatanganan surat pernyataan dukungan

B. Waktu

Rapat dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018

Jam : 14.30 WIB s.d 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi V

C. Peserta Rapat

Rapat diikuti oleh Kabag, Kasubag Rapat, Kasubag Tata Usaha, Staf Subbag. Rapat, Staf Subbag Tata Usaha, Tenaga Ahli Komisi V

D. Hasil/Keputusan Rapat

1. Mengingat pada bulan Oktober 2018 ini, Komisi V DPR RI akan melaksanakan rapat-rapat untuk pembahasan anggaran mitra kerja Komisi V Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan proyek perubahan sehingga tidak mengganggu kegiatan Komisi V.
2. Semua peserta rapat sepakat untuk membangun komitmen dan memiliki pemahaman yang sama terhadap proyek perubahan yang sedang dilaksanakan dan akan mendukung sepenuhnya agar proyek perubahan ini dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Semua peserta rapat memberikan dukungan yang diwujudkan dengan penandatangan surat pernyataan dukungan.

E. Penutup

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.



DAFTAR HADIR

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Tim Efektif
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018
Pukul : 14.30 wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi V
Acara : Konsolidasi, Penyesuaian jadwal, dan
.....Penandatanganan surat Pernyataan dukungan

Jumlah Hadir :

NO.	INI A M A	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dra. Prima MB, Nuwa, Msi	Kepala Bagian	1. <u>Prima MB</u>
2	Kunarto, S. Sos	Kasubbag Rapat	2. <u>Kunarto</u>
3	Nunik Prihatin Budi Astuti, SH	Kasubbag Tata Usaha	3. <u>Nunik Prihatin</u>
4	Dyah Renowati, S.Sos	Analisis Data & Informasi	4. <u>Dyah Renowati</u>
5	Nina Herlina, SH	Analisis Tata Usaha	5. <u>Nina Herlina</u>
6	Muhamad Sodik, SE	Pengadministrasi Umum	6. <u>Muhamad Sodik</u>
7	Aris Munandar	Pengadministrasi Rapat	7. <u>Aris Munandar</u>
8	Muhamad Subqi	Pengelola Persidangan	8. <u>Muhamad Subqi</u>
9	Ria Damayanti	Pegolah Data	9. <u>Ria Damayanti</u>
10	Misna Parman	Pengadministrasi Umum	10. <u>Misna Parman</u>
11	M. Hasbi Azis	Tenaga Ahli Komisi V	11. <u>M. Hasbi Azis</u>
12	Hendro Wibowo	Tenaga Ahli Komisi V	12. <u>Hendro Wibowo</u>

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
13	Dimas Dipoyono	Tenaga Ahli Komisi V	13. <i>Dimas</i>
14	Adi Setiawan	Tenaga Ahli Komisi V	14. <i>Adi</i>
15	Salihuddin	Tenaga Ahli Komisi V	15. <i>Salih</i>
16	16.
17	17.
18	18.
19	19.
20	20.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Nunik Prihatin Budiaستuti, SH
NIP : 196912021998032002
Jabatan : Kasubag Tata Usaha
2. Nama : Dyah Renowati, S.Sos
NIP : 197108251991022001
Jabatan : Analis Data dan Informasi
3. Nama : Nina Herlina, SH
NIP : 197910152005022001
Jabatan : Analis Tata Usaha
4. Nama : Muhammad Sodik, SE
NIP : 196512271988031002
Jabatan : Pengadministrasi Umum
5. Nama : Muhamad Subqi
NIP : 196611251992031002
Jabatan : Pengelola Persidangan
6. Nama : Aris Munandar
NIP : 196812271989031005
Jabatan : Pengadministrasi Rapat
7. Nama : Ria Damayanti
NIP : 198001042005022001
Jabatan : Pengolah Data
8. Nama : Misna
NIP : 196908162003121003
Jabatan : Pengadministrasi Umum

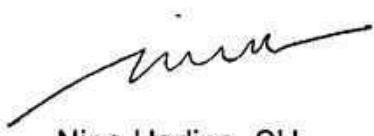
dengan ini menyatakan memberikan dukungan kepada:

- Nama : Kunarto, S.Sos
NIP : 197310161994031002
Jabatan : Kasubag. Rapat Sekretariat Komisi V

atas Proyek Perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "**SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI**"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan,



Nina Herlina, SH



Dyah Renowati, S.Sos



Nunik Prihatin Budiaستuti, SH



Aris Munandar



Muhammad Sodik, SE



Muhamad Subqi



Ria Damayanti



Misna

LAMPIRAN
MILESTONES 3



Photo 14. Tim Kerja Teknis melakukan inventarisir dan menganalisa Laporan Kunjungan Kerja



Photo15. Tim Kerja Teknis melakukan analisa, identifikasi, dan pengelompokan data sesuai mitra kerja



Photo16. Tim Kerja Teknis berdiskusi, melakukan analisa, identifikasi, dan pengelompokan data sesuai mitra kerja



**KOMPILASI TEMUAN DAN REKOMENDASI
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI
Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2018 - 2019**

**BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2018**

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Jawa Timur dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Untuk pembangunan Jembatan Ploso, Lingkar Mojo Agung, dana telah tersedia untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Masih ada sekitar 48 Lahan yang belum dibebaskan (33 Milik Masyarakat, 15 Tanah Milik PT KAI yang digunakan oleh warga dan terikat kontrak tahunan dengan pihak PT KAI) dan diharapkan pada bulan November 2018 dapat diselesaikan.		
2.	Komisi V DPR RI mengimbau untuk Pemerintah daerah untuk memfasilitasi arsitektur lokal dengan mengadakan sayembara desain arsitektur Jembatan Ploso sehingga nilai kearifan lokal dapat dipadukan dan dapat menjadi salah satu ikon daerah		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Aceh Singkil, Prov. Aceh dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Drh. Johni Allen Marbun</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Masalah penanggulangan banjir perlu mendapat perhatian yang serius karena Kabupaten Aceh – Singkil kerap dilanda banjir jika musim hujan tiba. Untuk itu diperlukan pembuatan tanggul raksasa sepanjang 700 meter termasuk pembuatan DED-nya. Ditambah lagi dengan banyaknya sungai-sungai yang mengalir pada Kabupaten tersebut, dengan adanya banjir baik itu pasang surut maupun rob, dan kondisi alam dengan curah hujan yang tinggi, sungai tersebut banyak terjadi pendangkalan sehingga dibutuhkan normalisasi.		
2.	Diperlukan pembangunan Jalan Singkil-Kuala Baru-Trumon sepanjang 65 km.		
3.	Dibutuhkan pembangunan Jembatan Kilangan Aceh – Kuala Baru sepanjang 150 m dan Jembatan Aceh Selatan - Aceh Singkil.		
4.	Dibutuhkan pembangunan pengaman pantai Pulau Banyak sepanjang 1 km.		
5.	Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait mengenai Perencanaan Tata Ruang Wilayah khususnya di Kabupaten Aceh-Singkil agar mengkaji perencanaan tata ruang yang dibuat berdasarkan rencana kawasan dan infrastruktur yang aman terhadap banjir.		
6.	Komisi V DPR RI meminta Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk memperhatikan permasalahan pengendalian banjir di Kabupaten Aceh-Singkil antara lain dengan mengkaji kemungkinan melakukan normalisasi sungai-sungai di Aceh Singkil, pembangunan tanggul raksasa, dll.		

7.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah terkait terhadap pembangunan Jalan Singkil – Kuala Baru – Trumon sepanjang ±65 km dan pembangunan Jembatan Kayu Menang – Kuala Baru sepanjang 150 m dan Jembatan Aceh Selatan - Aceh Singkil agar dapat segera diwujudkan.	
8.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR agar membuat gorong-gorong pada titik rawan banjir di Jalan Nasional yang menghubungkan jalan antar Provinsi khususnya Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.	
9.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk membangun pengaman pantai Pulau Banyak sepanjang 1 km dalam rangka menunjang pariwisata daerah di Kabupaten Aceh-Singkil.	

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Jambi dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 18 s.d 20 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Anton Sukartono Suratto, MSi</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Jalan akses pelabuhan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kurang lebih 155 Km dari Jambi, terdiri dari ruas jalan dari Jambi ke Muara Sabak dengan status jalan nasional dengan panjang 60 Km. Dari 60 km ini, sepanjang kurang lebih 16 km statusnya masih rusak dan saat ini sedang tahap perbaikan yang menggunakan sistem foam mortar.		
2.	Kondisi Jembatan Batang Hari Tiga saat ini statusnya masih dalam desain dan belum sampai tahap konstruksi fisik		
3.	Sistem pengendali banjir Stasiun Pompa Asam di Sungai Asam yang terletak di Pasar Angsa Dua, Kota Jambi telah beroperasi sejak 2017. Namun demikian perlu diperhatikan pemeliharaannya dan serta peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya banjir antara lain dengan meningkatkan sistem pengelolaan sampah di perkotaan yang juga ikut menyebabkan terjadinya banjir.		
4.	Pembangunan dan pengembangan Danau Sipin yang memiliki kapasitas sekitar 2,19 juta m ³ untuk tujuan pariwisata dan olah raga direncanakan akan rampung pada akhir 2018.		
5.	Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR terkait dengan upaya perbaikan Jalan Nasional menuju Pelabuhan Ujung Jabung ruas Jambi – Muara Sabak sepanjang 15 km yang menggunakan foam mortar. Diharapkan penggunaan foam mortar ini dapat mempercepat pengerjaan dan menekan biaya sehingga kegiatan ini selesai tepat pada waktunya.		
6.	Komisi V DPR RI mendesak agar Jembatan Batang Hari Tiga yang sampai saat ini masih dalam tahap desain dapat segera diselesaikan.		
7.	Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap telah beroperasinya Stasiun Pompa Asam sebagai pengendali banjir Kota Jambi. Namun demikian, selain hadirnya sistem pengendalian banjir berbasis pompa ini, diperlukan pula kerja sama pemerintah daerah dan masyarakat agar banjir dapat selalu dicegah.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 18 s.d 20 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET:
1.	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengusulkan perlunya dukungan pemerintah pusat terutama untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Pariwisata : 106,70 Km • Jalan Lingkar Luar Pariwisata : 168,50 Km • Peningkatan status Jalan Nasional Poros Rantepao – Pangala’ – Baruppu’ – Batas Propinsi Sulawesi Barat (P=62,27 Km) • Pembangunan Waduk Batukianak Kec. Sa’ dan 150 x 2.000 M • Total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk usulan program tersebut supaya dapat didanai oleh APBN sekitar Rp 1,7 Triliun. 		
2.	<p>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh BBWS Pompengan - Jeneberang di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 21 paket pekerjaan dengan anggaran total senilai 2.752.813.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang dikelola oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan Jeneberang yang meliputi 2 (dua) kegiatan pokok, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 10 Paket • Kegiatan Padat Karya Tunai - Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irrigasi (P3TGAI) 11 Paket 		
3.	<p>Komisi V DPR RI mendukung upaya pembangunan infrastruktur Ruas jalan Lingkar Dalam maupun Ruas Jalan Lingkar Luar guna mempercepat aksesibilitas menuju kawasan Strategis Pariwisata Nasional.</p>		
4.	<p>Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan agar melakukan Study Kelayakan (Feasibility Study) terkait pembangunan ruas jalan menuju lokasi destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Toraja Utara.</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 26 s.d 28 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Capt. Anthon Sihombing</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Terdapat jalan disisi danau Toba yang merupakan akses ke Taman Bunga Bakkara dan pelabuhan Bakti Raja yang belum teraspal sepanjang 1,5km . Padahal jalan tersebut sudah dianggarkan dalam APBN secara multi years. Kondisi jalan masih berupa pengerasan dan terdapat tikungan tajam dengan elevasi yang tinggi serta sangat sempit. Hal tersebut sangat membahayakan bagi pengendara yang menuju kawasan danau Toba khususnya ke kecamatan Bakti Raja dimana terdapat pelabuhan penyeberangan.</p> <p>Selain itu terdapat jalan ring road yang menuju Ibu Kota Dologsanggul yaitu Ruas Gonting Bulu-Simangarongsang yang mempunyai panjang 8,2 km, yang beraspal baru 2,6 km. Sisanya jalan perkerasan berbutir sepanjang 5,5 km</p>		
2.	<p>Proyek rehabilitasi/perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan sungai/pantai Sungai Aek Sibundong Dolok Sanggul memakan biaya Rp 7,45 miliar. Perlu percepatan penyelesaian agar masyarakat pemukiman dan lahan pertanian masyarakat aman dari ancaman banjir. Proyek ini juga diharapkan menjadi objek pariwisata khususnya wisata adventure berupa arum jeram.</p>		
3.	<p>Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga agar melanjutkan pembangunan jalan berupa pengaspalan untuk ruas Sipinsur – Bakti Raja sepanjang 1,5 km yang merupakan kelanjutan proyek yang sudah dikerjakan dalam multiyears contract. Selain itu Komisi V DPR RI juga mendesak pembangunan Ring Road yaitu Ruas Gonting Bulu-Simangarongsang yang mempunyai panjang 8,2 km, yang baru masih berupa jalan perkerasan sepanjang 5,5 km</p>		
4.	<p>Komisi V DPR RI mendesak percepatan penyelesaian pembangunan proyek Pengendali Banjir Aek Sibundong agar pemukiman dan lahan pertanian masyarakat terbebas dari banjir sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan hasil pertanian.</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Prov. D.I. Yogyakarta dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 26 s.d 28 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No:	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Saat ini, rencana pembangunan Tol Bawen-Jogja masih belum bisa dilaksanakan karena DPRD Jawa Tengah masih menolak adanya proyek tersebut.		
2.	Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk mempercepat rencana pembangunan jalan Tol Bawen-Jogja dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) agar dapat segera terlaksana		
3.			
4.			
5.			

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemey Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional 2010 – 2025, KSPN Danau Ranau yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan kawasan pengembangan pariwisata nasional. Berdasarkan hasil pembahasan penyusunan Rancangan SK Menteri PUPR tentang Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional (RUJMJN) pertimbangan peningkatan status Jalan Provinsi menuju Jalan Nasional yaitu KSPN Danau Ranau harus masuk dalam Prioritas Pariwisata Kementerian Pariwisata.		
2.	Bandara Banding Agung sebagai sarana transportasi udara di Kab. OKU Selatan, cukup penting mengingat daerah ini berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Ranau, dimana banyak tempat wisata yang menarik, seperti Danau Ranau dan pemandian air panas. Namun Aksesibilitas infrastruktur jalan menuju lokasi lokasai destinasi wisata di Kabupaten OKU Selatan dan sekitarnya menuju masih sulit dijangkau;		
3.	Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi dengan pemerintah Propinsi Kabupaten OKU Selatan, Propinsi Sumatera Selatan agar melakukan aspek kajian kemungkinan dampak lingkungan yang nanti ditimbulkan, keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara dan memperhatikan hasil kajian sejauh mana peningkatan positif dari sisi manfaat ekonomis, finansial dan sosial apabila Bandara Udara Banding Agung ini difungsikan kembali di OKU Selatan.		
4.	Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kerja sama bersama mitra Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memaksimalkan fungsi Bandara udara ini guna mobilisasi masyarakat dan barang sebagai jembatan udara, guna peningkatan dan pengembangan pariwisata serta perekonomian di wilayah Kabupaten OKU Selatan, khususnya destinasi ke obyek obyek wisata.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau progres pembangunan Pelabuhan Patimban</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 21 s.d 22 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Desain Jalan menuju Pelabuhan dianggap terlalu sempit untuk dilewati oleh kendaraan pengangkut container pada bagian belokan		
2.	Komisi V DPR RI mengharapkan agar desain jalan menuju Pelabuhan dapat lebih diperhatikan terutama pada bagian belokannya yang dianggap terlalu sempit untuk dapat dilewati oleh kendaraan pengangkut kontainer.		
3.	Komisi V DPR RI berharap agar segera ditentukan jalan tengahnya agar pembebasan lahan segera tuntas.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Anton Sukartono Suratto, MSi</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Kawasan Bukit Rawi yang menghubungkan jalan nasional dari Palangka Raya ke Buntok, yang kerap terendam banjir hingga 60 hingga 70 sentimeter jika memasuki musim hujan hal tersebut berdampak pada masyarakat sekitar sehingga menyulitkan aktivitas pengendara yang melintas di saat hujan deras dan menyulitkan roda distribusi perekonomian.		
2.	Target anggaran proyek pembangunan jalan nasional ini diperkirakan membutuhkan anggaran kurang lebih 300 hingga 350 Miliyar untuk panjang 3,1 KM, sudah mendapat slot pada tahun 2018 oleh pemerintah pusat sebesar 60 hingga 70 Miliyar dan Komisi V DPR RI bersama pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penambahan anggaran untuk tahun 2019 nanti sebesar 100 Miliyar agar peroses pengerjaanya tidak terlalu lama dan bisa selesai dalam kurun waktu 3 tahun.		
3.	Ada dua alternative pola pembangunan ruas jalan nasional di kawasan Bukit Rawi yang terkena dampak banjir ini dengan pola timbunan biasa maupun timbunan keras atau pile slab, namun lebih direkomendasikan dengan pola pile slab karena akan menjadi lebih aman, ekonomis dan juga bisa menjaga ekosistem air di sekitarnya.		
4.	Komisi V DPR RI mendukung pembangunan jalan nasional Palangkaraya-Buntok dengan pola pile slab sepanjang 3,1 kilometer, serta meminta kepada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air berkordinasi dalam rangka terlaksananya pembangunan ini;		
5.	Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi dengan pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah agar sarana prasarana pembangunan di bidang infarstruktur dapat terlaksana dengan maksimal dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi pasca bencana gempa bumi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 23 s.d 25 Agustus 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemry Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan adalah daerah yang paling parah terkena dampak gempa, banyaknya korban meninggal dunia akibat akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang disebabkan konstruksi bangunan yang tidak tahan gempa.		
2.	Sebanyak 8 titik jalan menalami keretakan, dan 13 titik jalan mengalami longsor. Dari 8 titik yang retak tersebut 5 titik sudah selesai direhabilitasi, sedangkan dari 13 titik longsor, 8 titik sudah selesai dibersihkan.		
3.	Terkait dengan seringnya terjadi gempa di Indonesia, Komisi V DPR RI meminta seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI untuk berkoordinasi dengan BNPB dan instansi Pemerintah lainnya dalam melakukan kajian sehubungan perlunya substansi tentang bencana alam dimasukkan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah.		
4.	Melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap rumah-rumah, gedung-gedung perkantoran, jalan-jalan dan gedung-gedung sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rusak akibat gempa serta mengambil langkah-langkah strategis untuk melaksanakan rehabilitasi;		
5.	Melakukan audit terhadap seluruh bangunan, fasilitas sosial dan fasilitas umum di lokasi rawan gempa di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (di antaranya UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi) ;		
6.	Meningkatkan bantuan fasilitas sarana dan prasarana antara lain seperti pasokan air bersih dan sanitasi (hidran, toilet umum/wc portable, dan bioseptik) pada seluruh titik-titik penampungan pengungsi korban gempa;		
7.	Melakukan pemberian bantuan antara lain berupa supervisi pada tahap rehabilitasi-rekonstruksi bangunan rumah kepada masyarakat yang berada di daerah rawan gempa yang merujuk pada pedoman dan standar desain rumah tahan gempa (Model Rumah Instant Sederhana Sehat (RISHA).		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 30 Agustus s.d 1 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Anton Sukartono Suratto, MSi</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Bendungan Tritip mempunyai kapasitas 2,4 juta m³ untuk menambah suplai air baku masyarakat dan Industri di sebagian Kota Balikpapan sebesar 250 liter/detik kubik. Kebutuhan air baku Kota Balikpapan saat ini sebesar 2.100 liter/detik, dimana baru bisa dipenuhi sebesar 1.228 liter/detik sehingga masih kekurangan 872 liter/detik.</p> <p>Tugas Kementerian PUPR adalah untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tahap I berkapasitas 200 liter/detik di Kecamatan Balikpapan Timur. Pembangunan dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dengan nilai Rp 91,99 miliar kontrak tahun jamak 2017-2018. Progres hingga 27 Mei 2018 telah mencapai 50,1% dan ditargetkan selesai Oktober 2018.</p>		
2.	<p>Jalan tol Balikpapan – Samarinda dengan total panjang 99,35 kilometer (km) ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018, targetnya dapat beroperasi penuh pada awal tahun 2019.</p> <p>Sampai saat ini, pengerjaan konstruksi jalan tol ini sudah mencapai 66,77 persen sedangkan pengadaan lahannya telah mencapai 95,47 persen. Dalam pelaksanaannya tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jalan ini yaitu pembebasan lahan sehingga hal tersebut menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.</p>		
3.	<p>Komisi V DPR RI mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tahap I berkapasitas 200 liter/detik di Kecamatan Balikpapan Timur sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Balikpapan baik untuk keperluan industri maupun masyarakat.</p>		
4.	<p>Komisi V DPR RI mendorong dan mendukung percepatan penyelesaian jalan tol Balikpapan-Samarinda khususnya terkait dengan percepatan pembebasan lahan. Untuk itu Komisi V DPR meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Kalimantan Timur dan juga pihak-pihak yang terkait sehingga penyelesaian dapat dituntaskan secara cepat.</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 30 Agustus s.d 1 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Gatot Sudjito</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Belum ada keberlanjutan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan sejak tahun 2016</p> <p>Hal tsb disebabkan karena turunnya status pelabuhan dalam rencana induk pelabuhan nasional yang semula dalam Kepmen Perhubungan no. kp. 414 th 2013 hierarki Pelabuhan Pacitan tahun 2015 adalah Pelabuhan Pengumpul (PP), dengan adanya Kemenhub no. 901 tahun 2016 menjadi Pelabuhan Pengumpulan Lokal (PL).</p> <p>Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, memutuskan status pelabuhan Pacitan sebagai pelabuhan pengumpulan lokal, maka kementerian PUPR berdasarkan bukan menjadi kewenangan pusat untuk penanganan jalan aksesnya, sehingga dalam pelaksanaan fisiknya ragu-ragu untuk melanjutkan pelaksanaannya.</p>		
2.	<p>Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan pembangunan jalan akses masuk Pelabuhan Nggelon di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Drh. Johni Allen Marbun</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET
1.	Pemerintah Kabupaten Simeulue mengusulkan agar jalan lingkar Pulau Simeulue menjadi Jalan Nasional. Diperlukan pula penambahan jalan nasional dari yang eksisting 65 km menjadi 220 km, serta pengalihan status jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan nasional atau jalan strategis nasional.		
2.	Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan penambahan jalan dari kewenangan daerah ke jalan nasional melalui pengalihan status jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan nasional atau jalan strategis nasional di Kab. Simeulue		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kab. Luwu Timur dan Luwu Utara, Prov. Sul.Sel dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Drs. Ibnu Munzir, MAP</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Jaringan irigasi kiri terletak di kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara. Nilai konstruksi sebesar 366.408.113.000 dari APBN Murni dengan kontrak tahun jamak. Progress pelaksanaan sampai dengan 30 Agustus 2018 adalah terhadap kontrak Add II realisasi fisik 23,670 % dan keuangan 30,497 %. Terhadap pagu anggaran 2018 realisasi fisik sebesar 35,916 dan keuangan 22,156 %.		
2.	Jaringan irigasi kanan 1 terletak di kecamatan Masamba dan kecamatan Baebunta. Nilai kontrak konstruksi sebesar 373.371.519.000 yang bersumber dari APBN rupiah murni dengan kontrak tahun jamak. Progres pelaksanaan sampai 30 Agustus 2018 adalah terhadap kontrak Add1 realisasi kontrak 21,95 % dan keuangan sebesar 28,13 %. Sementara terhadap pagu anggaran 2018 realisasi fisik sebesar 30,27 % dan keuangan 22,53 %.		
3.	Jaringan irigasi Kanan 2 terletak di Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Nilai kontrak konstruksi sebesar 297.965.374.000 yang bersumber dari APBN dengan rupiah murni dengan kontrak tahun jamak. Progres pelaksanaan sampai dengan 30 Agustus 2018, terhadap kontrak Add II realisasi fisik 14,94 % dan keuangan 23,61 %. Terhadap pagu anggaran 2018 realisasi fisik 1,45 % dan keuangan 0,00 %.		
4.	Jembatan Sabbang, Luwu Utara yang menjadi penghubung transportasi Trans Sulawesi tepatnya antara batas Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Sulsel kondisinya sangat memprihatinkan akibat tergerus air sungai rongkong yang deras. Talud pengaman jembatan dengan panjang 125 meter itu nyaris ambruk.		
5.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR agar melakukan percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan pada pembangunan Bendung Baliase agar dapat lebih cepat berfungsi sebagai sarana penyediaan dan penyaluran air untuk pertanian maupun sebagai air baku konsumsi serta pariwisata di kabupaten Luwu Timur		

6.	Komisi V DPR RI mendesak kepada Ditjen Jasa Marga agar segera melakukan rehabilitasi jembatan Sabbang sebagai akses utama antara Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Luwu Utara khususnya talud penahan banjir agar tidak semakin memperparah keadaan jembatan yang menyebabkan keruntuhan sehingga membahayakan pengguna jalan.		
7.	Komisi V DPR RI dan Bupati Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara sepakat untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur baik sektor jalan, jembatan, dan bandara udara sehingga berdampak positif bagi kemajuan di kabupaten masing-masing khususnya dan Indonesia pada umumnya.		



**KOMPILASI TEMUAN DAN REKOMENDASI
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI
Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2018 - 2019**

**BIDANG
PERHUBUNGAN**

**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2018**

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 26 s.d 28 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Capt. Anthon Sihombing</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Pembangunan dermaga Bakkara di Baktiraja akan dimulai tahun 2019. Dermaga ini sangat strategis dalam menunjang KSPN Danau Toba. Namun terdapat masalah di Danau Toba yaitu adanya penurunan debit air akibat dari aktivitas perkebunan dan juga aktivitas penebangan hutan lindung sebagai resapan air Danau Toba oleh masyarakat. Karena itu dermaga ini perlu ditunjang oleh dermaga-dermaga kecil, contohnya di Tipang. Dengan surutnya danau toba maka demaga sebaiknya dibangun berbentuk "Ponton" dimana kalau dibuat berbentuk Ponton akan mengikuti tingginya permukaan air sehingga nantinya akan mengurangi resistensi.</p> <p>Selain itu dalam pembangunan dermaga harus memenuhi standar berbagai fasilitas umum, seperti toilet yang bersih. Sarana ibadah untuk wisatawan muslim yaitu mushola juga harus diperhatikan, karena wisatawan domestik kita mayoritas adalah muslim.</p>		
2.	<p>Komisi V DPR RI sepakat dengan Bupati Humbang Hasundutan untuk dapat memperhatikan dan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pelabuhan penyeberangan dan juga pengendali banjir di Kabupaten Humbang Hasundutan.</p>		
3.	<p>Komisi V DPR RI mendesak percepatan pembangunan Dermaga pelabuhan Bakkara sebagai infrastruktur yang mendukung danau Toba sebagai Kawasan Strategis pariwisata nasional dan juga sebagai akses masyarakat dalam penyeberangan ke daerah lain disekitar Danau Toba</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Prov. D.I. Yogyakarta dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 26 s.d 28 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Mengenai progress pembangunan bandara yang saat ini sudah mencapai 3,9% dari target hingga akhir bulan Oktober ini sebanyak 5%. Pembangunan akan terus dilaksanakan secara paralel dan dijadwalkan April 2019 sudah bisa beroperasi secara minimum standard. Dan tinggal tersisa enam bulan dan manajemen yakin April sudah bisa dimanfaatkan. PT. Angkasa Pura 1 terus kebut pekerjaan. Sekarang sudah terdapat 2.000 pekerja dan pada bulan November ada 6.000 pekerja.		
2.	Untuk aksesibilitas dan transportasi, Komisi V DPR RI mengharapkan ada perlintasan kereta api yang melewati bandara untuk menghubungkan bandara dengan stasiun. Selain itu, rencana pembangunan jalan Tol Bawen-Jogja dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) juga dapat terlaksana.		
3.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan agar terdapat perlintasan kereta api yang melewati bandara untuk menghubungkan bandara dengan jalur kereta api dengan kota-kota yang ada dan tujuan pariwisata di DI Yogyakarta dan daerah sekitarnya antara lain Provinsi Jawa Tengah.		
4.	Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan PUPR untuk mereview Struktur bandara yang sudah didesain dan dimitigasi agar kuat terhadap bencana termasuk tsunami, gempa bumi dan gunung meletus.		
5.	Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan agar berusaha mengoptimalkan potensi yang ada di Kulon Progo khususnya masyarakat yang terdampak secara langsung atas pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport untuk dapat dijadikan tenaga kerja di bandara.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau progres pembangunan Pelabuhan Patimban</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 21 s.d 22 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Kecewa dengan tidak hadirnya Pihak PSP3 IPB dan Pihak Appraisal dari pemerintah dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pusakanegara		
2.	Warga Subang mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban dan berharap dapat diikutsertakan dalam pembangunan pelabuhan Patimban sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga subang Beberapa warga masih menolak harga ganti rugi tanah yang diberikan oleh pemerintah		
3.	Komisi V DPR RI mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Patimban dan berharap agar dengan pembangunan Pelabuhan Patimban dapat menjadi alternatif bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok dan bisa menjadi sarana untuk mengembangkan daerah.		
4.	Komisi V DPR RI berharap agar segera ditentukan jalan tengahnya agar pembebasan lahan segera tuntas.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemy Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Pada saat kunjungan Komisi V DPR RI, diketahui bahwa Aset Lapangan Terbang Banding Agung telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 455/KPTS/IX/2004 Tanggal 19 Agustus 2003 Tentang Penghapusan/Penyerahan Barang Inventaris Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan Bermotor Dan Barang Inventaris Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan.</p>		
2.	<p>Peningkatan Status Lapangan terbang Banding Agung untuk difungsionalisakan kembali (refungsionalisasi) masih menemui permasalahan yang teknis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat longsoran di area lapangan terbang; • Dibutuhkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi (PENLOK) Bandar Udara Banding Agung Sebagai Bandara Komersil; • Dibutuhkannya dukungan Revitalisasi Pembangunan Melalui Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat; 		
3.	<p>Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi dengan pemerintah Propinsi Kabupaten OKU Selatan, Propinsi Sumatera Selatan agar melakukan aspek kajian kemungkinan dampak lingkungan yang nanti ditimbulkan, keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara dan memperhatikan hasil kajian sejauh mana peningkatan positif dari sisi manfaat ekonomis, finansial dan sosial apabila Bandara Udara Banding Agung ini difungsikan kembali di OKU Selatan.</p>		

4.	<p>Komisi V DPR RI mendukung upaya peningkatan fungsi lapangan terbang Banding Agung dan pembangunan infrastruktur menyangkut aspek-aspek kesiapan dan kelayakan bandara, rencana induk pembangunan bandara, kelayakan mengenai keselamatan operasi penerbangan, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan dan</p>		
5.	<p>Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi dengan pemerintah Propinsi Kabupaten OKU Selatan, Propinsi Sumatera Selatan agar melakukan aspek kajian kemungkinan dampak lingkungan yang nanti ditimbulkan, keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara dan memperhatikan hasil kajian sejauh mana peningkatan positif dari sisi manfaat ekonomis, finansial dan sosial apabila Bandara Udara Banding Agung ini difungsikan kembali di OKU Selatan.</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik			
Objek/Daerah Kunker : Provinsi Jawa Timur dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi			
Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018			
Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Tempat Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur sungguh tidak layak. Sifat tempat masih mengontrak</p> <p>Tidak adanya pemisahan kewenangan yang jelas antara PT. KAI dan Ditjen Perkeretaapian</p> <p>Loan yang digunakan untuk pengembangan KA regional Surabaya sudah ada</p> <p>Masih terdapat banyak jalur mati yang tersebar pada regional Jawa Timur</p>		
2.	Komisi V DPR RI akan memanggil PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk membahas Program menghidupkan Jalur mati dan pembangunan Jalur baru.		
3.	Komisi V DPR RI mendukung untuk dilakukannya Moratorium perlintasan sebidang yang sudah untuk dilengkapi dengan peralatan penunjang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan.		
4.	Komisi V DPR RI mendukung program modernisasi Kereta Api dengan menggunakan model pembiayaan dari Kewarganegaraan Indonesia (Bank Infrastruktur).		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Aceh Singkil, Prov. Aceh dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018 Ketua Tim : Drh. Johni Allen Marbun			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Dibutuhkan perpanjangan runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil sepanjang ±400 m untuk mendukung pariwisata agar dapat didarati minimun oleh pesawat ATR.		
2.	Dibutuhkan peningkatan status serta pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil melalui penambahan dermaga dan pembangunan kolam pelabuhan.		
3.	Dibutuhkan penambahan kapal Penyeberangan Fery ke Pulau Sarok dan Pulau Banyak sebesar 750 GT sebanyak 2 unit.		
4.	Dibutuhkan peningkatan pelabuhan penumpang Singkil dan pembangunan kolam pelabuhan.		
5.	Dibutuhkan kapal Penyeberangan Fery / RORO 5000 GT sebanyak 1 unit.		
6.	Dibutuhkan pembangunan dermaga Rakyat sebanyak 6 unit.		
7.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan untuk mengalokaikan anggaran terhadap perpanjangan runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil sepanjang ±400 m untuk mendukung pariwisata agar dapat didarati minimun oleh pesawat ATR.		
8.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubdat dan Hubla Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi status pelabuhan di Kab. Aceh Singkil serta mengalokasikan anggaran terhadap pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil melalui penambahan dermaga dan pembangunan kolam pelabuhan.		
9.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubdat dan Hubla Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan anggaran terhadap penambahan kapal Penyeberangan Fery ke Pulau Sarok dan Pulau Banyak sebesar 750 GT sebanyak 2 unit.		

10.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubdat dan Hubla Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan anggaran terhadap peningkatan pelabuhan penumpang Singkil dan pembangunan kolam pelabuhan.		
11.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubdat dan Hubla Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan anggaran terhadap Penyeberangan Fery / RORO 5000 GT di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1 unit.		
12.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubdat dan Hubla Kementerian Perhubungan untuk mengkoordinasikan dengan pemda terkait dan mengalokasikan anggaran terhadap kebutuhan pembangunan dermaga Rakyat sebanyak 6 unit di Kabupaten Aceh Singkil.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Jambi dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 18 s.d 20 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Anton Sukartono Suratto, MSi</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Perluasan runway Sultan Thaha masih terkendala dengan pembebasan lahan di sekitar Bandara yang saat ini masih terdapat rumah-rumah penduduk		
2.	Komisi V DPR RI mendesak kepada PT. Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Jambi agar pembebasan lahan di sekitar Bandara yang saat ini masih terdapat rumah-rumah penduduk dapat diselesaikan sehingga perluasan runway Sultan Thaha dapat segera terlaksana.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Anton Sukartono Suratto, MSI</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Pada saat kunjungan Komisi V DPR RI, pembangunan fasilitas Terminal Bandara Tjilik Riwut sedang dibangun dan perkembangannya telah mencapai 92 persen. Ditargetkan sebelum Bulan April 2019 proses pembangunan ini akan rampung dilaksanakan;</p> <p>Anggaran Proyek pembangunan Terminal bandara Tjilik Riwut sebesar Rp 306 Miliar, sementara ini sudah menelan biaya sekitar Rp 308 Miliar;</p> <p>Beberapa fasilitas sisi udara yang masih dalam progress pekerjaan lanjutan yakni pembuatan apron baru, pembuatan taxi way, termasuk marking dan pekerjaan lanjutan pembuatan Ground Support Equipment (GSE), road sebagai penghubung terminal baru dan apron baru. Dan nantinya desain interior yang digunakan merupakan desain khas yang merupakan kearifan lokal Kalimantan Tengah;</p> <p>Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sedang melakukan survey terhadap Aset Barang Milik Negara Bandar Udara Tjilik Riwut yang dikerjasamakan dengan pemerintah dan rencananya akan ditetapkan di Bulan Juni 2019.</p>		
2.	<p>Komisi V DPR RI mendukung pembangunan terminal penumpang bandara Tjilik Riwut dan meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan pembangunan agar dapat segera diresmikan serta dipergunakan masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah;</p>		
3.	<p>Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi dengan pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah agar sarana prasarana pembangunan di bidang infarstruktur dapat terlaksana dengan maksimal dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kab. Luwu Timur dan Luwu Utara, Prov. Sul.Sel dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Drs. Ibnu Munzir, MAP</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Danau Matano dijadikan sebagai kawasan peletarian alam sehingga dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam dan juga dijadikan jalan atau akses penyeberangan dengan menggunakan kapal, perahu dan speed boat, untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya yang ada di pesisir Luwu.		
2.	Danau Towuti merupakan kawasan konservasi wisata alam di Indonesia dan sebagai lokasi wisata yang popular di Sulawesi Selatan. Danau Towuti juga digunakan sebagai akses penyeberangan dengan menggunakan kapal, perahu, dan speed boat untuk menghubungkan daerah-daerah lain yang ada di pesisir.		
3.	Belum tersedianya lahan untuk pengembangan bandar udara Andi Jemma Masamba total kebutuhan lahan sesuai master plan ± 35 ha		
4.	Bandara Lagaligo Palopo perlu dikembangkan ke depannya untuk mendukung pelayanan dan kenyamanan transportasi udara.		
5.	Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk segera merealisasikan pengadaan kapal yang layak dan memadai sebagai sarana transportasi bagi penduduk di sekitar danau Matano dan Towuti sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengakses antara daerah di Luwu Timur dalam program dan kegiatan APBN 2019		
6.	Komisi V DPR RI mendesak kepada Kementerian Perhubungan agar secara tegas melakukan penegakan hukum bagi kapal-kapal yang berlayar di danau agar sesuai dengan peraturan keselamatan berlayar termasuk penyediaan sarana penyeleman yang memadai pada setiap kapal. Terkait dengan keselamatan, Komisi V DPR RI juga meminta agar dibangun Pos Sar di Danau Matano dan Towuti untuk mengantisipasi kecelakaan kapal yang berlayar.		

7.	Komisi V DPR RI mendesak melakukan rehabilitasi dermaga penyeberangan di Danau Matano dan Towuti sebagai sarana transportasi antara daerah di kabupaten Luwu Timur.		
8.	Komisi V DPR RI menyetujui rencana perpanjangan runway Bandara Andi Djemma di kabupaten Luwu Utara untuk direalisasikan agar bisa didarati oleh pesawat yang lebih besar. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta pemerintah daerah yang tetap berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara agar secepatnya menyediakan lahan perpanjangan sesuai kebutuhan bandara.		
9.	Komisi V DPR meminta kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan perpanjangan runway Bandara I Lagaligo di Kota Palopo agar bisa di darati pesawat yang besar dari yang ada saat ini.		
10.	Komisi V DPR RI dan Bupati Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara sepakat untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur baik sektor jalan, jembatan, dan bandara udara sehingga berdampak positif bagi kemajuan di kabupaten masing-masing khususnya dan Indonesia pada umumnya.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Drh. Johni Allen Marbun</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Pada Pelabuhan Sibigo Pulau Simeulue, akses jalan pelabuhan sepanjang 25 km yang merupakan jalan provinsi kondisinya kurang memadai, walaupun sudah dilakukan pematatan, namun belum dilakukan perkerasan. (Hubla)</p> <p>Pelabuhan Sibigo yang hancur pada saat tsunami tahun 2004 kondisinya sangat tidak layak, terdapat bekas dermaga yang hancur dan sudah tidak dapat dilalui oleh kapal, dan untuk pembangunannya kembali, masih menunggu berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi, seperti Detail Engineering Design (DED), FS, Amdal, RIP dan lain sebagainya. Lahan yang sudah disiapkan oleh PemKab. Simeulue sebesar 3 Hektar. Diperkirakan dalam membangun Pelabuhan multifungsi Sibigo dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 54 Miliar. (Hubla)</p>		
2.	<p>Pada Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, diperlukan peningkatkan prasarana pelabuhan Sinabang, seperti dolphin dan plat beton di dermaga agar mempermudah kapal untuk bersandar. Diperlukan anggaran sebesar Rp 5 M dalam peningkatan perlengkapan prasarana pelabuhan tersebut. Kapal penyeberangan juga masih memprihatinkan, butuh ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. (Hubdat)</p> <p>Terdapat permasalahan aset mengapa Pelabuhan Sinabang belum sepenuhnya terbangun, karena Pemda belum menyerahkan aset pelabuhan kepada Pemerintah Pusat, sehingga anggaran sulit turun, untuk itu diharapkan agar adanya MOU mengenai aset pembangunan Pelabuhan Sinabang antara Pemda dengan Pemerintah pusat, sehingga permasalahan aset dapat segera diselesaikan. (Hubdat)</p>		

3.	<p>Pada Bandar Udara Lasikin Kab. Simeulue, runway bandara eksisting sepanjang 1410 m, diperpanjang pada tahun 2018 sepanjang 300 m, pembangunan runway membutuhkan pemotongan bukit, perlu juga dukungan peningkatan prasarana bandara seperti awos BMKG dari kategori 1 ke kategori 3, Airnav LPPNPI, dll.</p>		
4.	<p>Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan anggaran terhadap pembangunan Pelabuhan Sibigo pada RAPBN ke depan.</p>		
5.	<p>Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan anggaran terhadap peningkatan prasarana Pelabuhan Sinabang pada RAPBN ke depan termasuk menyelesaikan permasalahan aset lahan</p>		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 30 Agustus s.d 1 September 2018</p> <p>Ketua Tim : Gatot Sudjito</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Belum ada kepastian keberlanjutan pembangunan fisik pelabuhan Nggelon dari Kementerian Perhubungan</p> <p>Hal tsb disebabkan karena turunnya status pelabuhan dalam rencana induk pelabuhan nasional yang semula dalam Kepmen Perhubungan no. kp. 414 th 2013 hierarki Pelabuhan Pacitan tahun 2015 adalah Pelabuhan Pengumpul (PP), dengan adanya Kemenhub no. 901 tahun 2016 menjadi Pelabuhan Pengumpulan Lokal (PL).</p> <p>Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, memutuskan status pelabuhan Pacitan sebagai pelabuhan pengumpulan lokal, maka kementerian PUPR beralasan bukan menjadi kewenangan pusat untuk penanganan jalan aksesnya, sehingga dalam pelaksanaan fisiknya ragu-ragu untuk melanjutkan pelaksanaannya.</p>		
2.	Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana Pelabuhan Nggelon, di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur		
3.	Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu berkordinasi ke Pemerintah Kabupaten Pacitan agar sarana prasarana pembangunan lanjutan Pelabuhan Nggelon dapat terlaksana		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi pasca bencana gempa bumi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 23 s.d 25 Agustus 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemmy Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Terdapat beberapa kerusakan infrastruktur milik Kementerian Perhubungan akibat gempa Lombok antara lain: Gedung Kantor, Gedung Terminal Penumpang, Kerusakan Causeway Dermaga dan Kerusakan Gedung kantor serta gudang.		
2.	Komisi V DPR RI memberikan dukungan secara penuh kepada Kementerian Perhubungan terhadap penanganan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan pasca gempa bumi di Lombok seperti dermaga penyeberangan, terminal bus, pelabuhan laut dan Bandar udara.		
3.	Pada kesempatan kunjungan kali ini, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa: selimut, terpal, bahan-bahan bangunan, obat-obatan dan bahan-bahan makanan (mi instant, beras, dll)		



**KOMPILASI TEMUAN DAN REKOMENDASI
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI
Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2018 - 2019**

**BIDANG
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2018**

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Prov. D.I. Yogyakarta dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur dan transportasi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 26 s.d 28 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Sigit Sosiantomo</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta Airport telah bekerjasama dengan BMKG untuk desain struktur bandara menggunakan data hasil penelitian yang dilakukan oleh BMKG terkait potensi Gempa dan Tsunami yang mungkin terjadi pada masa mendatang, BMKG memperkirakan gempa yang akan terjadi hanya sekitar 6 SR dengan tinggi gelombang Tsunami yang mungkin terjadi sekitar 9 meter		
2.	Komisi V DPR RI mengharapkan agar kedepannya untuk pembangunan Bandar Udara dapat terus dilakukan kerjasama dengan pihak BMKG sehingga dapat meminimalisir potensi bahaya yang timbul akibat gempa dan tsunami		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel dalam rangka meninjau pembangunan Infrastruktur</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 13 Oktober 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemy Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Pada saat kunjungan Komisi V DPR RI, diketahui bahwa di Provinsi Sumatera Selatan, BMKG memiliki asset berupa 2 gedung di Palembang dengan lahan masing masing seluas 25 Ha di Kota Palembang dan 1,000 M2 di Jakabaring; Kondisi peralatan BMKG di Stasiun Meteorologi II Palembang berfungsi baik seperti Automated Weather Observing System (AWOS), taman alat Meteorologi, namun jumlahnya terbatas untuk melayani luasnya wilayah pelayanan yang ada;		
2.	Stasiun Meteorologi II Palembang juga menyajikan data dan informasi tentang peta potensi bahaya kebakaran hutan, titik titik panas, grafik distribusi angin melalui analisa parameter cuaca;		
3.	Komisi V DPR RI mendorong BMKG sebagai pusat informasi cuaca dan geofisika untuk bekerja lebih maksimal dalam menyajikan data update, melakukan kalibrasi alat BMKG secara regular, dan perlu aktif melakukan koordinasi dengan mitra BPPT dan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanannya.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik			
Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi			
Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018			
Ketua Tim : Drh. Johni Allen Marbun			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Pada Bandar Udara Lasikin Kab. Simeulue, runway bandara eksisting sepanjang 1410 m, diperpanjang pada tahun 2018 sepanjang 300 m, pembangunan runway membutuhkan pemotongan bukit, perlu juga dukungan peningkatan prasarana bandara seperti awos BMKG dari kategori 1 ke kategori 3, Airnav LPPNPI, dll.		
2.	Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk mengalokasikan anggaran terhadap peningkatan prasarana bandara seperti awos BMKG dari kategori 1 ke kategori 3 pada RAPBN ke depan.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi pasca bencana gempa bumi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 23 s.d 25 Agustus 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemy Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>BMKG masih memonitor aktifitas gempa bumi susulan dengan peralatan sensor yang tersebar di Lombok sampai aktifitas gempa bumi ini selesai. Dalam upaya memonitor aktifitas gempa bumi ini, BMKG melakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama dengan ITB dalam meletakkan seismograf selama satu bulan di Pulau Lombok. • Akan segera memasang peralatan magnet bumi di daerah Taliwang – Sumbawa. 		
2.	<p>Terkait dengan seringnya terjadi gempa di Indonesia, Komisi V DPR RI meminta seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI untuk berkoordinasi dengan BNPB dan instansi Pemerintah lainnya dalam melakukan kajian sehubungan perlunya substansi tentang bencana alam dimasukkan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah</p>		
3.	<p>Komisi V DPR RI memberikan dukungan secara penuh kepada BMKG untuk meningkatkan instrumen dan peralatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam rangka memberikan early warning system terkait dengan kemungkinan terjadinya gempa dan tsunami.</p>		



**KOMPILASI TEMUAN DAN REKOMENDASI
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI
Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2018 - 2019**

**BIDANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2018**

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik			
Objek/Daerah Kunker : Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi			
Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d 8 September 2018			
Ketua Tim : Drh. Johni Allen Marbun			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	Basarnas memerlukan kapal untuk kesiapsiagaan di Kab. Simeulue		
2.	Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia SAR dan peralatan pendukungnya.		

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

<p>Jenis Kunjungan Kerja : Kunjungan Kerja Spesifik</p> <p>Objek/Daerah Kunker : Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi pasca bencana gempa bumi</p> <p>Tanggal Pelaksanaan : 23 s.d 25 Agustus 2018</p> <p>Ketua Tim : Ir. Fary Djemy Francis, MMA</p>			
No.	TEMUAN DAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN	KET.
1.	<p>Pada kejadian gempa tanggal 5 Agustus 2018, kejadian terjadi pada jam 19:46 WITA, dan informasi diterima Basarnas jam 19:48 WITA. Basarnas bergerak menuju lokasi kejadian jam 20:13 WITA.</p> <p>Beberapa kendala yang dialami oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Alat Berat dan Pemotong Baja guna untuk memotong rangka bangunan-bangunan yang sudah roboh sehingga menghambat dalam pembersihan puing-puing bangunan. - Banyak sumber mata air yang tertutup dan pipa air yang rusak dan patah akibat pegeseran yang di sebabkan oleh gempa-gempa susulan yang masih sering terjadi. emotong rangka bangunan-bangunan yang sudah roboh sehingga menghambat dalam pembersihan puing-puing bangunan. 		
2.	<p>Komisi V DPR RI memberikan dukungan dan apresiasi terhadap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan segala keterbatasannya melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban gempa. Selanjutnya Komisi V DPR RI memberikan dukungan terhadap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk meningkatkan peralatan sarana dan prasarana SAR yang digunakan untuk penyelamatan korban.</p>		

LAMPIRAN
MILESTONES 4



Photo . Tim Kerja Teknis membuat panduan teknis penyusunan SIMAK KUNKER

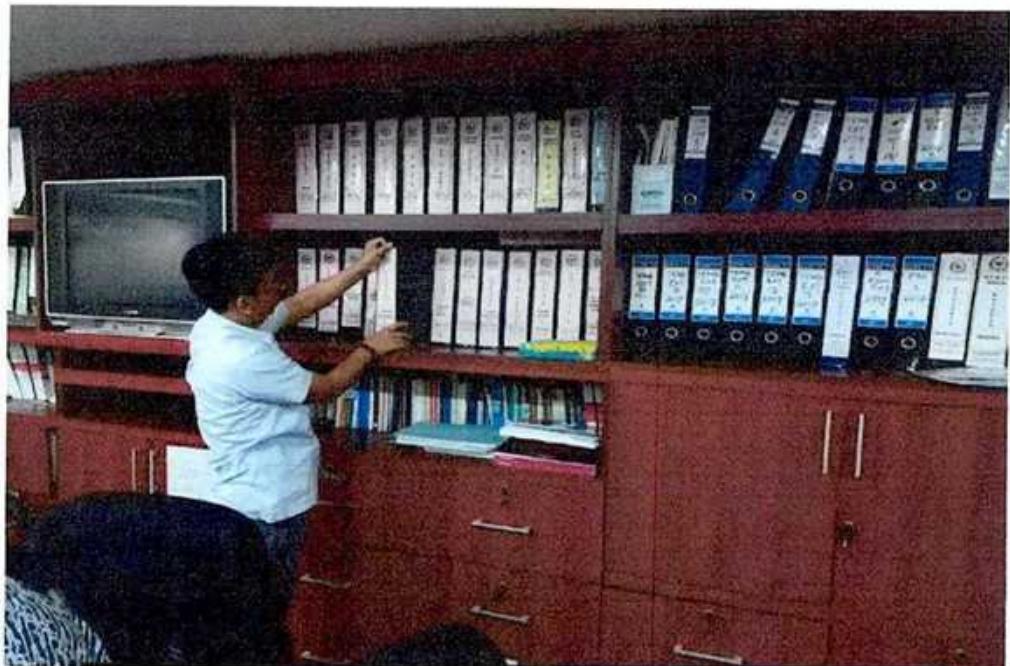
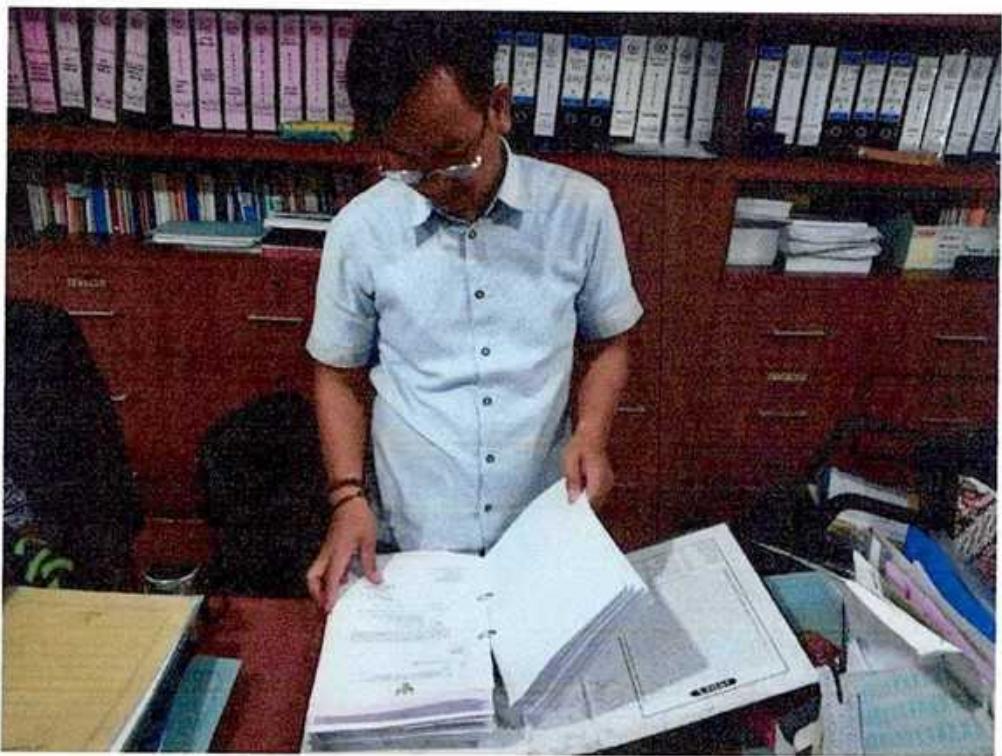


Photo. Tim Kerja Teknis mengelola data dan mengarsipkan ke dalam folder sehingga memudahkan apabila diperlukan

REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI²⁾

Jenis Kunjungan Kerja ³⁾ : Objek/Daerah Kunker ⁴⁾ : Tanggal Pelaksanaan ⁵⁾ : Ketua Tim ⁶⁾ :			
No ⁷⁾	TEMUAN DAN REKOMENDASI ⁸⁾	TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN ⁹⁾	KEL ¹⁰⁾
1.	
2.	
3.	
4.	
dst	

URAIAN SINGKAT PEDOMAN PENGISIAN FORM:

- 1) **Bidang** : adalah Kementerian atau Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi;
- 2) **Komisi** : adalah alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan Kunjungan Kerja
- 3) **Jenis Kunjungan** : adalah Jenis kunjungan kerja yang dilaksanakan, misalnya kunjungan kerja Spesifik, kunjungan kerja Reses;
- 4) **Objek/Daerah Kunker** : adalah Daerah/Lokasi yang dikunjungi serta maksud dan tujuan dari pelaksanaan kunjungan kerja;
- 5) **Tanggal Pelaksanaan** : adalah tanggal pelaksanaan kunjungan kerja;
- 6) **Ketua Tim** : adalah Ketua/Anggota Komisi V DPR RI yang ditunjuk untuk menjadi Ketua Tim dalam kunjungan kerja;
- 7) **No.** : adalah nomor urut;
- 8) **TEMUAN DAN REKOMENDASI** : adalah berisi mengenai Temuan atau Permasalahan yang dijumpai pada saat pelaksanaan kunjungan kerja serta Rekomendasi dari Tim Kunjungan Kerja untuk dapat ditindaklanjuti oleh Mitra Kerja atau stake holders terkait.
- 9) **TINDAK LANJUT/TARGET PENYELESAIAN** : adalah berisi mengenai tindak lanjut atau langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah/Mitra Kerja Komisi atau stake holders terkait penyelesaian dari temuan/rekomendasi dari Tim Kunjungan Kerja.
- 10) **KET.** : adalah keterangan yang berisi check list yang menginformasikan bahwa temuan/rekomendasi dari Tim Kunjungan Kerja telah ditindaklajuti atau akan diselesaikan oleh Pemerintah/Mitra Kerja Komisi atau stake holders terkait.

LAMPIRAN
MILESTONES 5



Photo Rapat Sosialisasi mengenai proyek perubahan dengan penghubung Mitra Kerja Komisi V dan stakeholders



Photo Rapat Sosialisasi mengenai proyek perubahan dengan penghubung Mitra Kerja Komisi V dan stakeholders



Photo Tim Kerja Administratif menginformasikan dan melakukan konfirmasi ke Penghubung Mitra Kerja



Photo Tim Kerja Administratif menginformasikan dan melakukan konfirmasi ke Penghubung Mitra Kerja



Photo Penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh Bapak Drs. Ibnu Munzir, MAP, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PG



Photo

Penandatanganan surat pernyataan dukungan
oleh Bapak Ir. Sigit Sosiantomo, Wakil Ketua
Komisi V dari Fraksi PKS



Photo Pernyataan dukungan dari Bapak Lasarus, S.Sos, MSi, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PDIP



Photo Pernyataan dukungan dari Bapak Syarif Abdullah Alkadrie, Anggota Komisi V dari Fraksi Nasdem



Photo Pernyataan dukungan dari Bapak Anthon Sihombing, Anggota Komisi V dari Fraksi PG



Photo Pernyataan dukungan dari Ibu Neng Eem Marhamah Zulfa, Anggota Komisi V dari Fraksi PKB



Photo Pernyataan dukungan dari Ibu Nurhayati, Anggota Komisi V dari Fraksi PPP

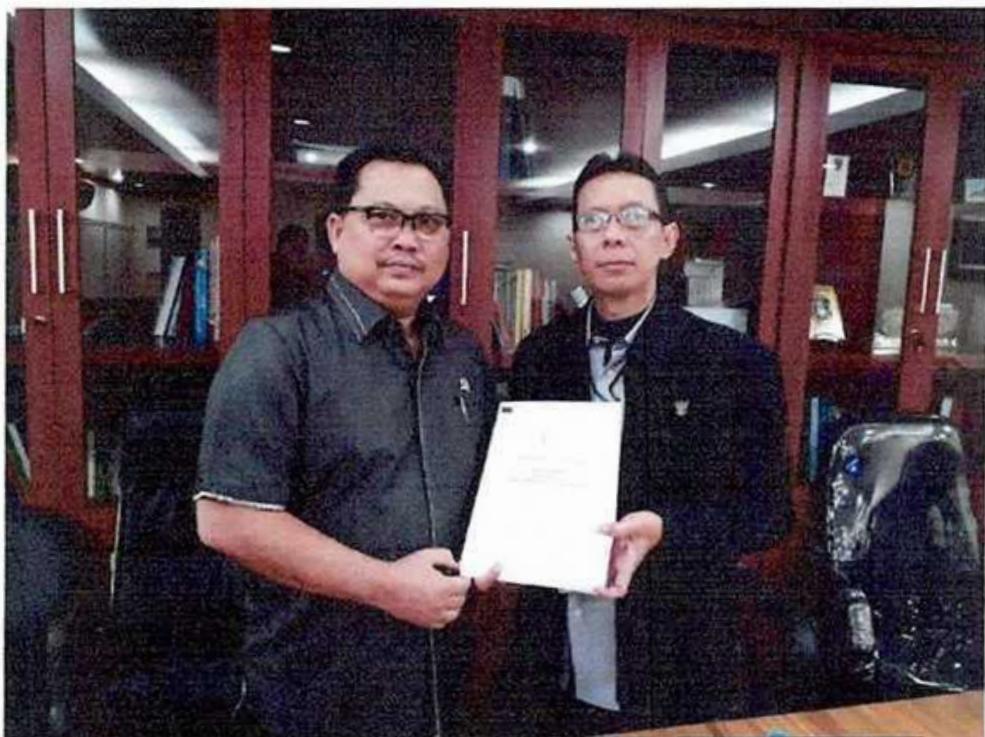


Photo Pernyataan dukungan dari Bapak Ida Bagus Putu Sukarta, Anggota Komisi V dari Fraksi PD



**Photo Pernyataan dukungan dari Bpk Subarna,
Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra**



**Photo Pernyataan dukungan dari Bpk Nyoman Ganetri,
penghubung perwakilan Pemda Bali dan Bpk Saiful
Bahri, penghubung perwakilan Pemda Sumut**



**Photo Pernyataan dukungan dari Bapak Indra Iskandar,
Sekretaris Jenderal DPR RI**



Photo

**Penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh
Bapak Dimyati Sudja, Kepala Biro Persidangan I, Setjen
DPR RI**



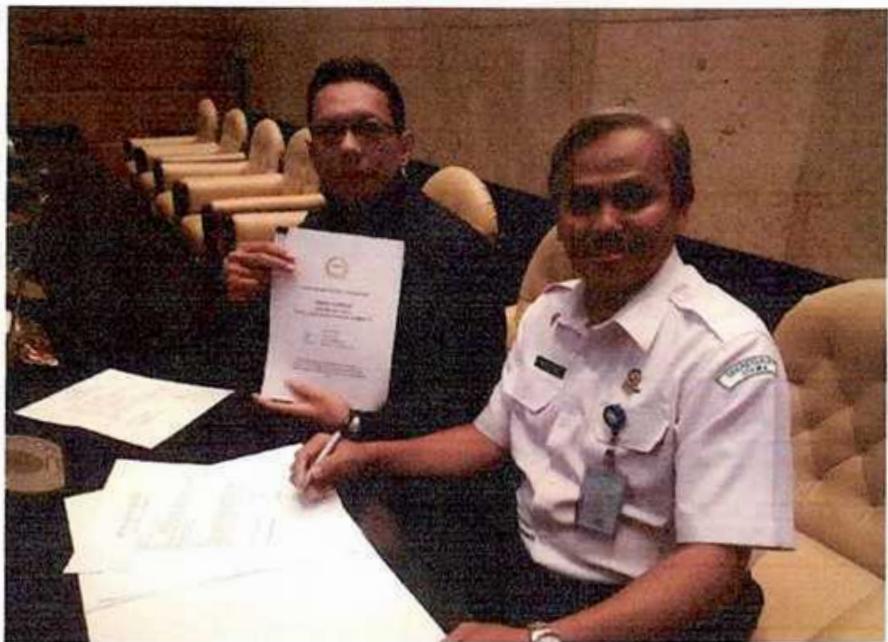
Photo

Penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh Bpk. Wibisono Sularso (Kasubag. Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)



Photo

Penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh Ibu Ernita Titis Dewi (Kasubag. Analisa dan evaluasi, Kementerian Perhubungan)



Photo

**Penandatanganan surat pernyataan dukungan
oleh Bpk. Aries Erwanto (Kabag. Program dan
Penyusunan Anggaran dari BMKG)**



Photo Penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh Bpk. Yanto Hadiputro (Kasubag. Rencana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : PW01/2117 / DPR-RI / XI/2018

13 November 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Rapat Sosialisasi Laporan Kunjungan Kerja

Yth.

1. Sdr. Penghubung Kementerian PUPR;
2. Sdr. Penghubung Kementerian Perhubungan;
3. Sdr. Penghubung Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
4. Sdr. Penghubung BMKG;
5. Sdr. Penghubung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
6. Sdr. Penghubung Pemprov. Bali, Sumatera Utara, NTT.

JAKARTA

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan komunikasi dan kerja sama serta hubungan antar lembaga, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Sekretariat Komisi V DPR RI akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018

Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)

Acara : Koordinasi dan sosialisasi Matriks Kunjungan Kerja Komisi

Sehubungan dengan hal itu, mohon kehadiran Sdr. pada acara dimaksud. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kabagset. Komisi V DPR RI,

Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Nip. 196105271992032001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI DAN CATATAN
RAPAT TIM EFEKTIF**

A. Tujuan

Rapat dengan penghubung mitra kerja komisi V DPR RI dilaksanakan dalam rangka untuk sosialisasi mengenai proyek perubahan yang dilakukan oleh reformer dan penandatanganan surat pernyataan dukungan dari stakeholders.

B. Waktu

Rapat dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018

Jam : 10.30 WIB s.d 11.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)

C. Peserta Rapat

Rapat diikuti oleh penghubung mitra kerja Komisi V DPR RI dan penghubung Kantor perwakilan pemerintah daerah Sumut, Bali, dan NTT

D. Hasil/Keputusan Rapat

1. Reformer menyampaikan penjelasan dan memberikan gambaran kepada penghubung mitra kerja Komisi V DPR RI dan penghubung kantor perwakilan pemerintah daerah Sumatera Utara, Bali, dan NTT mengenai proyek perubahan yang sedang dilakukan agar memperoleh kesamaan pemahaman dan persepsi untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini.
2. Semua peserta rapat dapat memahami dan akan mendukung proyek perubahan yang tengah dilakukan, dan sepakat akan lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi kedepannya sehingga dapat terwujud kerjasama antar-instansi yang baik dan berkesinambungan.
3. Beberapa peserta rapat memberikan dukungan yang diwujudkan dengan penandatangan surat pernyataan dukungan.

E. Penutup

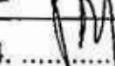
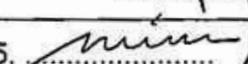
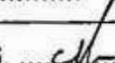
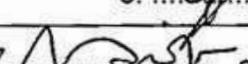
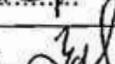
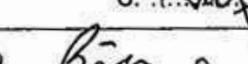
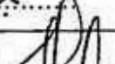
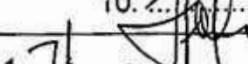
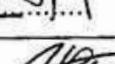
Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.



DAFTAR HADIR

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

Rapat Ke	:
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dgn Mitra
Hari/Tanggal	:	Kamis, 15 November 2018
Pukul	:	10.30 s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (Ruang kk V)
Acara	:	- Koordinasi dan Sosialisasi mengenai Hari Kunjungan Kerja
Jumlah Hadir	:

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dra. Prima MB, Nuwa, Msi	Kepala Bagian	1. 
2	Kunarto, S. Sos	Kasubbag Rapat	2. 
3	Nunik Prihatin Budi Astuti, SH	Kasubbag Tata Usaha	3. 
4	Dyah Renowati, S.Sos	Analisa Data & Informasi	4. 
5	Nina Herlina, SH	Analisa Tata Usaha	5. 
6	Muhamad Sodik, SE	Pengadministrasi Umum	6. 
7	Aris Munandar	Pengadministrasi Rapat	7. 
8	Muhamad Subqi	Pengelola Persidangan	8. 
9	Ria Damayanti	Pegolah Data	9. 
10	Misna Parman	Pengadministrasi Umum	10. 
11	M. Hasbi Azis	Tenaga Ahli Komisi V	11. 
12	Hendro Wibowo	Tenaga Ahli Komisi V	12. 

NO.	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
13	Dimas Dipoyono	Tenaga Ahli Komisi V	13. <u>Dimas</u>
14	Adi Setiawan	Tenaga Ahli Komisi V	14. <u>Adi</u>
15	Salihuddin	Tenaga Ahli Komisi V	15. <u>Salih</u>
16	16.
17	17.
18	18.
19	19.
20	20.



DAFTAR HADIR
MITRA KERJA KOMISI V DPR RI

Jenis Rapat : Rapat koordinasi dan Sosialisasi Proyek Perubahan
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018
 Pukul : 10.30 WIB Sampai Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang kk V).
 Acara : koordinasi dan Sosialisasi mengenai
 Hasil Kunjungan Kerja.

Jumlah Hadir :

NO.	INAIWA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Novinerwan	PPHAL - Biro Komisi PUPR	
2.	Bambang Ismanto	Kooper BM	
3.	GURAH DEWANTO	BMK G	
4.	Sugeng Hartadi	Basarnas	
5.	Ernita Titis D	Ksb Kementerian	
6.	Musdalifah	Kabag Umum BPSDMPKhub	
7.	HERRY J.b	Bapren - Laut	
8.	erinda R.	-" - Kemenhub	
9.	Yanto H.P.	Basarnas	
10.	Yugo Yuliantiyo m	BARBARA	
11.	NYOMAN GANZIWI	Badan Penghubung Bali	
12.	Ahmad Hadi	Kemendesa PDTT	
13.	IRSYAD IDHAM RAMID	Kemendesa PDTT	
14.	Musdalifah	BPSDM Phb	
15.	Fadil	BPSDM Phb	
16.	Eben. S	Sesditjen Perkestaan dan Kebudayaan	
17.	Chandra Andri L	Setkja Kemenko	
18.	Fahmi - S	Bapren - Mijen	
19.	Evita Asidah	ICSP - AE - DJU	
20.	IRWAN	-" -	
21.	Shikun Nawa	Staf Biro Penkabur Kementerian	

NO	NAMA	ABDIAN	PANDA TAKSIAM
22	Feza Dofit Lestari, SE MAP	STAFF Badan Pengelihng Sumsel	<i>Feza</i> <i>12/11/12</i>
23	Ditrimuliana N	PPHAL, Biro Kompi PUPR	
24	Rini R	BMKG	<i>Rini</i>
25	Merrina Suliyanti	BMKG	<i>Merrina</i>
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Pimpinan Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Sigit Sosiantomo

No. Ang : A-114

Jabatan : Pimpinan Komisi V DPR RI

menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jakarta, 24 Oktober 2018

Pimpinan Komisi V DPR RI

Ir. H. Sigit Sosiantomo

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Pimpinan Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Ibnu Munzir

No. Ang : A-319

Jabatan : Pimpinan Komisi V DPR RI

menyatakan memberikan dukungan atas proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pimpinan Komisi V DPR RI

Drs. H. Ibnu Munzir

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Pimpinan Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lasarus, S.Sos, MSI

No. Ang : A-217

Jabatan : Pimpinan Komisi V DPR RI

menyatakan memberikan dukungan atas proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pimpinan Komisi V DPR RI

Lasarus, S.Sos, MSI

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos
Jabatan : Kasubag. Rapat
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Pimpinan Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
No. Ang : A-381
Jabatan : Pimpinan Komisi V DPR RI

menyatakan memberikan dukungan atas proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jakarta, 16 Oktober 2018

Pimpinan Komisi V DPR RI

Ir. Fary Djemy Francis, MMA

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Iskandar
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Kunarto, S.Sos., Jabatan Kepala Sub Bagian Rapat Komisi V dengan judul **SIMAK KUNKER (Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI)**.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,


Indra Iskandar
NIP. 196611141997031001



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wibisono Sularso, ST

NIP. : 197209212008121002

Jabatan : Kasubag. Pelaporan Pimpinan & Hubungan Antar Lembaga II

Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

menyatakan memberikan dukungan atas Proyek Perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018

Mitra Kerja Komisi V DPR RI,

Wibisono Sularso, ST

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos
Jabatan : Kasubag. Rapat
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ernita Titis Dewi
NIP. : 197607102006042001
Jabatan : Kasubbag. Analisa & Evaluasi Transportasi udara & Penunjang
Instansi : Kementerian Perhubungan

menyatakan memberikan dukungan atas Proyek Perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018

Mitra Kerja Komisi V DPR RI,

Ernita Titis Dewi

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aries Erwanto, S.Kom, MM

NIP. : 197103221992021001

Jabatan : Kabag. Program dan Penyusunan Anggaran

Instansi : BMKG

menyatakan memberikan dukungan atas Proyek Perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018

Mitra Kerja Komisi V DPR RI,
Kabag. Program dan Perencanaan BMKG,

Aries Erwanto, S.Kom, MM

Peserta

Kunarto, S.Sos



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yanto Hadiputro, S.S

NIP. : 197910042005021001

Jabatan : Kasubbag. Rencana

Instansi : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

menyatakan memberikan dukungan atas Proyek Perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjudul "SIMAK – Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018

Mitra Kerja Komisi V DPR RI,

Yanto Hadiputro, S.S

Peserta

Kunarto, S.Sos



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : 124-P/PS.05/11/2018

Yth. : Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI
Dari : Lakhar Kepala Bagian Set. Komisi V DPR RI
Hal : Net surat penyampaian Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja
Komisi V DPR RI pada MP. I TS. 2018-2019
Tanggal : 21 November 2018

Dengan hormat kami sampaikan net surat penyampaian Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada MP. I TS. 2018-2019, yang ditujukan kepada :

1. Sekjen Kemen. PUPR;
2. Sekjen Kemen. Perhubungan;
3. Sekjen Kemen. DPDTT;
4. Sestama BMKG;
5. Sestama BNPP.

Apabila tidak ada koreksi mohon perkenan Bapak untuk dapat meneruskan surat sebagaimana dimaksud kepada Ibu Deputi Bidang Persidangan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**Lakhar Kepala Bagian
Set. Komisi V DPR RI,**


Kunarto, S.Sos
NIP. 197310161994031002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
DARI : KEPALA BIRO PERSIDANGAN I

Dengan hormat kami sampaikan net surat penyampaian Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada MP. I TS. 2018-2019, yang ditujukan kepada :

1. Sekjen Kemen. PUPR;
2. Sekjen Kemen. Perhubungan;
3. Sekjen Kemen. DPDTT;
4. Sestama BMKG;
5. Sestama BNPP.

Apabila tidak ada koreksi mohon perkenan Ibu untuk dapat meneruskan surat sebagaimana dimaksud kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI.

Atas perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 November 2018


M. DIMYATI SUDJA, S.Sos, M.Si,
NIP. 195909101980031005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
DARI : DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

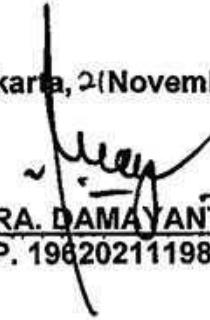
Dengan hormat kami sampaikan net surat penyampaian Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada MP. I TS. 2018-2019, yang ditujukan kepada :

1. Sekjen Kemen. PUPR;
2. Sekjen Kemen. Perhubungan;
3. Sekjen Kemen. DPDIT;
4. Sestama BMKG;
5. Sestama BNPP.

Apabila tidak ada koreksi, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani surat dimaksud.

Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 November 2018


DRA. DAMAYANTI, M.Si.
NIP. 196202111987032002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/21177/DPR RI/XI/2018 22 November 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI pada
MP. I TS. 2018-2019.

YTH. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I.
JL. PATTIMURA NO. 20

J A K A R T A

Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi V DPR RI, bersama ini kami sampaikan Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
3. Penghubung Kementerian PUPR RI.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/21177/DPR RI/XI/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI pada
MP. ITS. 2018-2019.

22 November 2018

YTH. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.
JL. MEDAN MERDEKA NO. 8

JAKARTA

Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi V DPR RI, bersama ini kami sampaikan Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
3. Penghubung Kementerian Perhubungan RI.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/21177 /DPR RI/XI/2018 22 November 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI pada
MP. I TS. 2018-2019.

YTH. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I.
JL. ABDUL MUIS NO. 7

JAKARTA

Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi V DPR RI, bersama ini kami sampaikan Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
3. Penghubung Kementerian DPDT RI.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/21177 /DPR RI/XI/2018 22 November 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI pada
MP. I TS. 2018-2019.

**YTH. SEKRETARIS UTAMA
BANDAR METEOROLOGI
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
JL. ANGKASA 1 KEMAYORAN**

JAKARTA

Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi V DPR RI, bersama ini kami sampaikan Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kermasyarakat;
3. Penghubung BMKG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/21177/DPR RI/XI/2018 22 November 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI pada
MP. I TS. 2018-2019.

**YTH. SEKRETARIS UTAMA
BANDAR NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
JL. ANGKASA B 15 KAV. 2-3 KEMAYORAN**

JAKARTA

Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi V DPR RI, bersama ini kami sampaikan Laporan dan Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
3. Penghubung BNPP.

LAMPIRAN
MILESTONES 6



Photo Rapat Tim Efektif untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan



Photo Rapat Tim Efektif untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI DAN CATATAN
RAPAT TIM EFEKTIF**

A. Tujuan

Rapat Tim Efektif dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan monitoring dan evaluasi mengenai proyek perubahan yang dilakukan oleh reformer dan penandatanganan surat pernyataan komitmen keberlangsungan proyek perubahan

B. Waktu

Rapat dilaksanakan :
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 November 2018
Jam : 15.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi V

C. Peserta Rapat

Rapat diikuti oleh Kabag, Kasubag Rapat, Kasubag Tata Usaha, Staf Subbag. Rapat, Staf Subbag Tata Usaha, Tenaga Ahli Komisi V

D. Hasil/Keputusan Rapat

1. Reformer menyampaikan penjelasan mengenai sejauhmana capaian dan penyelesaian dari proyek perubahan yang telah dilakukan dan juga menyampaikan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek perubahan.
2. Semua peserta rapat menyampaikan saran dan masukan serta akan mendukung keberlanjutan dari proyek perubahan yang tengah dilakukan .
3. Sebagai komitmen untuk keberlanjutan proyek perubahan, dilakukan penandatangan surat pernyataan komitmen keberlangsungan proyek perubahan.

E. Penutup

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.



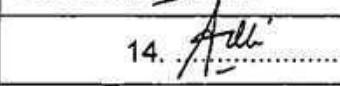
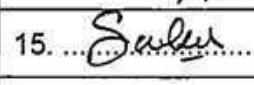
DAFTAR HADIR

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Tim Efektif
Hari/Tanggal : Jumat, 23 November 2018
Pukul : 15.00 WIB S.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi V
Acara : - Monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan

Jumlah Hadir :

NO.	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dra. Prima MB, Nuwa, Msi	Kepala Bagian	1.
2	Kunarto, S. Sos	Kasubbag Rapat	2.
3	Nunik Prihatin Budi Astuti, SH	Kasubbag Tata Usaha	3.
4	Dyah Renowati, S.Sos	Analisis Data & Informasi	4.
5	Nina Herlina, SH	Analisis Tata Usaha	5.
6	Muhamad Sodik, SE	Pengadministrasi Umum	6.
7	Aris Munandar	Pengadministrasi Rapat	7.
8	Muhamad Subqi	Pengelola Persidangan	8.
9	Ria Damayanti	Pegolah Data	9.
10	Misna Parman	Pengadministrasi Umum	10.
11	M. Hasbi Azis	Tenaga Ahli Komisi V	11.
12	Hendro Wibowo	Tenaga Ahli Komisi V	12.

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
13	Dimas Dipoyono	Tenaga Ahli Komisi V	13. 
14	Adi Setiawan	Tenaga Ahli Komisi V	14. 
15	Salihuddin	Tenaga Ahli Komisi V	15. 
16	16.
17	17.
18	18.
19	19.
20	20.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Rapat

Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Dimyati Sudja, S.Sos, MSi

Jabatan : Kepala Biro Persidangan I

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

3. Proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil diklat. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada Bulan Desember 2018 s.d Bulan Mei 2019 dan jangka panjang pada Mei 2019 s.d Mei 2020.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Jakarta, 22 November 2018

Mengetahui

Kepala Biro Persidangan I

M. Dimyati Sudja, S.Sos, MSi

Peserta

Kunarto, S.Sos



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kunarto, S.Sos
NIP : 197310161994031002
Jabatan : Kasubag. Rapat
Unit Kerja/Instansi : Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI

adalah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, dengan judul Proyek Perubahan:

**“SIMAK KUNKER – Sistem Matriks Hasil
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI”**

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan Proyek Perubahan yang merupakan *output* dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, saya menyatakan bahwa target sasaran jangka menengah dan jangka panjang Proyek Perubahan tersebut di atas akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai.

Mengetahui
Mentor/Atasan Langsung,


(Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi)
NIP. 196105271992032001

Jakarta, 26 November 2018
Yang menyatakan,


(Kunarto, S.Sos)
NIP. 197310161994031002